

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN
KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana
Di bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUHAMMAD SAUFI RIFA'I

NPM : 167310195

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSEMBAHAN

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku., Ayah,.. Ibu.,Adekku tercinta .terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan anakmu Ayah,,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu.

Untukmu Ayah (Sabar),,,Ibu (Siti Maudu'ah)..Adek (Wafiq Azizah).Terimakasih....

we always loving you... (ttd..Anak pertamamu)

untuk bapak dosen tercinta Bpk. Dr.Ahmad Fitra Yuza,S,IP.,MA terimakasih atas kesediaanwaktu yang diberikan kepada saya untuk membimbing saya dalam membuat skripsi semoga bapak diberikan kesehatan selalu, terimakasih atas bantuan ,kesabaran dalam memberikan nasehat ilmu kepada saya semoga ini semua menjadi pahala jariyah untuk bapak. Amiinuntuk kawan sejawat dan seperjuangan yang ada di fakultas ilmu sosial dan politik khususnya untuk : nyoman made suwaste,indah ayu rukmana,ludianto.maruf nur sidik, weni ramadhani,rena melinda,rennga wahyudi, dan yoyon saputra dan untuk kawan kos "kita kita squad" " MB Fishing Squad" terimakasih atas kebersamaan kita selama ini dalam merajut lintasan memori,solidaritas, motivasi sehingga menuntun saya untuk segera menyelesaikan kuliah terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Saufi Rifai
NPM : 167310195
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Pembimbing,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad saufi rifai
NPM : 167310195
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A


Risky Setiawan, S.IP., M.Si
Anggota,

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Syaprianto, S.Sos., M.Si


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *667* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 26 Agustus 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 27 Agustus jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Saufi Rifa'i
NPM : 167310195
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Strategi Pemerintah desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan .**

Nilai Ujian : Angka : " *81* " ; Huruf : " *A* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	Rijalul Fikri, MA	Notulen	4. <i>[Signature]</i>

Pekanbaru, 27 Agustus 2020
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 667/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muhammad Saufi Rifa'i
N P M	: 167310195
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Rijalul Fikri.,MA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad saufi rifai
NPM : 167310195
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A


Rigky Setiawan, S.IP., M.Si

Wakil Dekan I,

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul: **“strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Orang Tua Penulis yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat penulis yang sudah baik hatinya membantu dan memberikan semangat serta memberikan doa dan memberikan berbagai saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin Yarabbalamin...

Wassalammualaikum warahmatullahiwabarakatuh ...

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

Muhammad Saufi Rifai
NPM : 167310195

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xi	
DAFTAR GAMBAR	xii	
DAFTAR LAMPIRAN	xiii	
SURAT PERNYATAAN		Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK		Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN		Error! Bookmark not defined.
A. Latar belakang		Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan masalah		Error! Bookmark not defined.
C. tujuan dan kegunaan penelitian		Error! Bookmark not defined.
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR		Error!
		Bookmark not defined.
A. Studi kepustakaan.....		Error! Bookmark not defined.
1. konsep pemerintahan		Error! Bookmark not defined.
2. konsep Desa		Error! Bookmark not defined.
3. konsep Pemerintah Desa		Error! Bookmark not defined.
4. konsep strategi		Error! Bookmark not defined.
5. konsep organisasi		Error! Bookmark not defined.
6. konsep manajemen.....		Error! Bookmark not defined.
7. konsep manajemen pemerintah		Error! Bookmark not defined.
8. Konsep Keuangan Desa		Error! Bookmark not defined.
9. Konsep Pendapatan Asli Desa		Error! Bookmark not defined.
10. konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ...		Error! Bookmark not defined.
B. Penelitian terdahulu		Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka pikir		Error! Bookmark not defined.
D. Konsep oprasional		Error! Bookmark not defined.
E. konsep operasional variabel		Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
A. Tipe penelitian.....		Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi penelitian		Error! Bookmark not defined.
C. informan dan key informan penelitian		Error! Bookmark not defined.
D. teknik penarikan informan.....		Error! Bookmark not defined.
E. Jenis dan sumber data		Error! Bookmark not defined.
F. Teknik pengumpulan data		Error! Bookmark not defined.
G. Teknik analisis data		Error! Bookmark not defined.
H. jadwal penelitian		Error! Bookmark not defined.
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
		not defined.
A. Gambaran Umum Desa Beringin Makmur		Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Desa Beringin Makmur		Error! Bookmark not defined.
2. Visi Dan Misi Desa Beringin Makmur		Error! Bookmark not defined.
3. Keadaan Demografi Desa.....		Error! Bookmark not defined.
4. Kependudukan		Error! Bookmark not defined.
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa		Error! Bookmark not defined.
C. Susunan Anggota BPD Beringin Makmur.....		Error! Bookmark not defined.
D. Susunan Anggota Organiasi Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM)		Error!
		Bookmark not defined.

E. Aset Desa Yang Menunjang PADes Beringin Makmur **Error! Bookmark not defined.**

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.

A. Identitas informan**Error! Bookmark not defined.**

B. Strategi pemerintah desa beringin makmur **Error! Bookmark not defined.**

1. Mengamati lingkungan**Error! Bookmark not defined.**

2. penyusunan strategi.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Pelaksanaan strategi**Error! Bookmark not defined.**

4. evaluasi dan control**Error! Bookmark not defined.**

C. Hambatan Hambatan Dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur. **Error!**

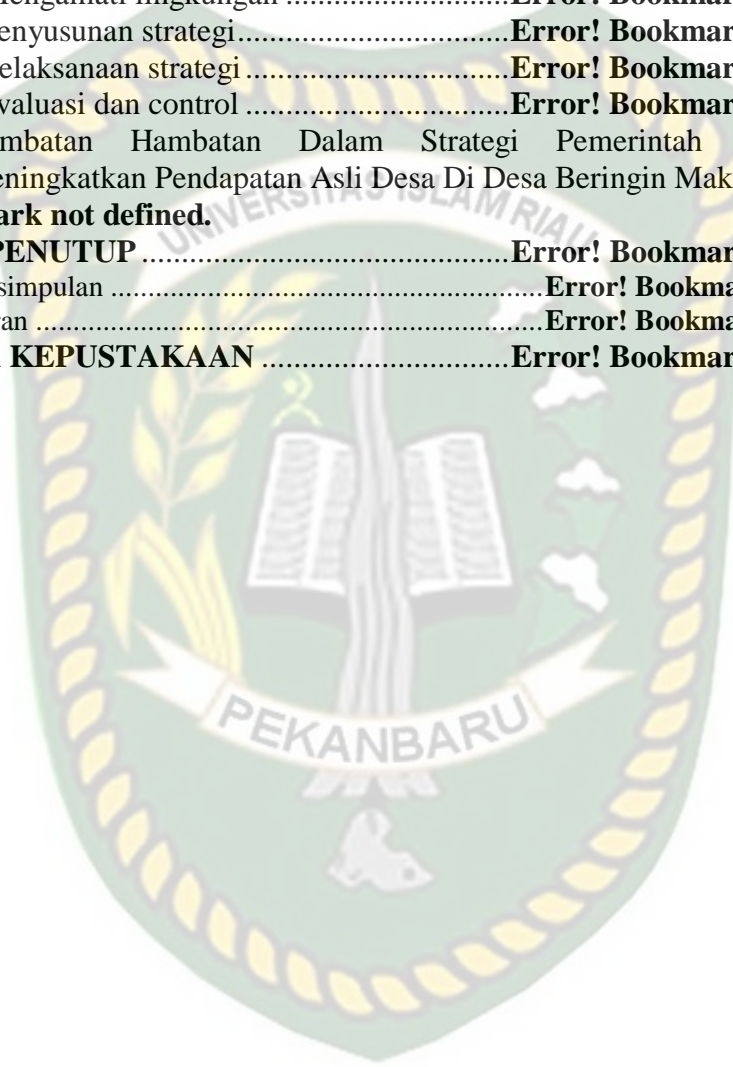
Bookmark not defined.

BAB VI PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR KEPUSTAKAANError! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 jumlah kelurahan/desa di kecamatan kerumutan.....	11
1.II desa atau kelurahan di kecamatan kerumutan	12
1.III hasil pendapatan asli desa beringin makmur	14
2.I penelitian terdahulu	47
2.II oprasional variabel.....	52
2.III jadwal kegiatan penelitian	59
4. I aksesibilitas desa beringin makmur.....	66
5.Ii dentitas informan	78
5.II identitas informan berdasarkan usia	79
5.III identitas informan berdasarkan jenis kelamin	80
5.Iv identitas informan berdasarkan pendidikan.....	81
5.V daftar pembiayaan usaha bumdes bina usaha	97

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 kerangka pikir	50
1.2 komponen analisis model interaktif	57
1.3 struktur organisasi pemerintah Desa	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1.1 pedoman wawancara penelitian	106
1.2 dokumentasi penelitian.....	109



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Saufi Rifai
Npm : 16731095
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah dalam Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2020



Muhammad Saufi Rifai

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA BERINGIN MAKMUR
KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN
ABSTRAK**

Muhammad Saufi Rifai

Strategi merupakan sebuah proses penentuan sebuah rencana para pemimpin puncak yang berfokus kepada tujuan jangka panjang sebuah organisasi, tidak hanya dalam sebuah konsep bisnis strategi juga dapat diimplementasikan dalam sebuah institusi pemerintahan baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tetap hidup dan berkembang. salah satunya adalah sebuah strategi dalam meningkatkan sebuah pendapatan asli desa. Masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian ini adalah bagaimana strategi dari pemerintah desa dalam meningkatkan sebuah pendapatan asli desa serta bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat strategi pemerintah desa beringin makmur dan untuk mendiskripsikan seperti apa strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya dari strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, serta menggunakan teknik penarikan informan yaitu *snowball* yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari key-informan beserta informan berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan indikator mengamati lingkungan, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi/control menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya dilakukan secara keseluruhan terhadap sumber sumber pendapatan asli desa yang dimiliki serta hanya ada 2 strategi yang dilaksanakan dan di implementasikan dan belum adanya bentuk pengendalian dari sebuah strategi yang sudah di implementasikan .hambatan yang terjadi dalam menentukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah kurangnya sumber daya manusi yang berkompeten dalam menentukan sebuah strategi, terbatasnya anggaran untuk melakukan strategi yang berbentuk usaha desa, tidak adanya kawasan yang bernilai strategi seperti kawasan wisata alam sehingga harus mengandalkan kreatifitas dan sumber daya finansial desa. Masukan dan saran dari peneliti kepada pemerintah desa adalah pemerintah desa sebaiknya juga merencanakan strategi terhadap aset lainnya yang dimiliki agar seluruh aset yang sebagai sumber pendapatan asli desa dapat dimaksimalkan dan tidak berfokus kepada aset Badan usaha milik desa saja. diharapkan pemerintah desa lebih sigap dalam menentukan sebuah strategi untuk meningkatkan pendapatan asli desa agar tidak bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Kata kunci: strategi, pemerintahan, pendapatan

**VILLAGE GOVERNMENT'S STRATEGY TO INCREASE THE
VILLAGE'S ORIGINAL REVENUE IN BERINGIN MAKMUR VILLAGE
KERUMUTAN SUBDISTRICT OF PELALAWAN DISTRICT**

Abstract

By

Muhammad Saufi Rifai

Strategy is a process of determining a plan of top leaders that focuses on the long-term goals of an organization, not only in a business concept strategy can also be implemented in a government institution whether it is a central government, local government, and a village government with the aim to organize and give the ministry to the Community to be alive and to be engaged. The problem raised in a study is how the strategy of the village government in raising an indigenous income of the village as well as a goal to find out the strategy of the Government of the Beringin makmur village prosper and to describe what strategy is done in increasing the village's original income. This research uses qualitative methods to describe the real state of the village government's strategy in increasing the village's indigenous revenue, as well as using the informant withdrawal technique ,snowball of 6 people, consisting of key-informant and informant based on research results using environmental strategy drafting, strategy implementation and Evaluations/control shows that the strategy undertaken by the village government is not fully done in the overall source of the village's original revenue source and there are only 2 strategies implemented and implemented and the absence of the control from a strategy that has been implemented. The obstacles that occur in determining the strategy to increase the village's original income is the lack of resources that are competent in determining a strategy, limited the budget to conduct a strategy in the form of village business, the absence of areas that are worth the strategy such as natural tourist areas so as to rely on the creativity and financial resources of the village. Input and advice from researchers to the village government is the village government should also plan a strategy against other assets that are owned so that all assets that as the source of the village's original income can be maximised and not focused on the assets of the village owned enterprises. The village government is expected to be more agile in determining a strategy to increase the village's original income in order not to rely on assistance from the central government.

Keyword: *strategy,governance,income*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berkewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemberian hak otonomi kepada suatu daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, melalui sebuah peningkatan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan suatu masyarakat .

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara umum disebutkan bahwa pemerintah bertugas menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta dalam pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah itu sendiri adalah membuat regulasi atau aturan pelayanan umum, pengembangan suatu sumber daya, melindungi ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai nilai kultural sosial, kesatuan dan persatuan, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan masyarakat berdasarkan pancasila serta menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas

pembantuan. Prinsip Desentralisasi adalah dengan otonomi yang seluas luasnya yang dalam artian suatu daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan daerah untuk mengatur dan memberikan pelayanan ,prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan sebuah kesejahteraan dari suatu masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah secara langsung memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah Daerah. Daerah harus mengoptimalkan pembangunan Daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014,pemerintah Daerah dan masyarakat daerah lebih diberdayakan dan di beri tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan daerah.

Upaya otonomi daerah memberikan sebagian wewenang kepada setiap daerah yang dimana konsep pengembangan harus lebih diarahkan kepada sektor prmbangunan berbasis tingkatan terendah yaitu Desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun kemajuan dari suatu daerah itu sendiri . desa sebagai sebuah kawasan otonom memang memiliki suatu hak hak yang bisa dikatakan istimewa yang dimana diantaranya adalah hak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa ,proses pembangunan dan proses pemilihan seorang kepala desa. Desa yang sebagai pemerintahan dalam tingkatan terendah dan yang dapat langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan

dapat menciptakan pembangunan yang berorientasi terhadap keinginan masyarakat.

Penyelenggaraan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pengaturan Desa berdasarkan;

- a. Rekognisi
- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul dan atau tradisionalitas yang diakui dan di hormati oleh setiap pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya untuk mempertegas posisi/kedudukan fungsi Desa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 48 menjelaskan bahwa perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana Kewilayahan ;dan
- c. Pelaksana teknis

Selanjutnya tertera dalam pasal 49 perangkat Desa sesuai dengan apa yang tertera dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ,pada ayat 2 perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah diangkat oleh kepala Desa dan di konsultasikan dengan camat atas nama bupati atau walikota, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah bertanggung jawab pada kepala desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan ,pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya ,kepala desa memiliki wewenang;(Nurcholis,2011:74)

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan yang telah di sepakati bersama BPD.

- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan oleh badan permusyawaratan desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD.
- e. Membina kemasayarakatan Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan ,dan
- i. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kemandirian dari sebuah desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa dapat menunjang kualitas pembangunan ataupun menambah pemasukan /penghasilan suatu Desa dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72 menyatakan bahwa sumber keuangan desa dapat berasal dari;

1. Pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotog royong dan lain lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi pendapatan sumber keuangan desa
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima oleh kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa, alokasi APBN, alokasi dana desa bantuan keuangan APBD provinsi atau kabupaten serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sumber keuangan desa sangatlah banyak. Sumber pendapatan desa yang maksimal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik berupa pemberdayaan terhadap masyarakat.

Menurut A.W Wdjaja (2003:131) pendapatan asli desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan melalui sumber-sumber asli Desa dan partisipasi masyarakat, secara terperinci sumber-sumber pendapatan Desa bersumber dari;

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Yang Terdiri Dari;

a. Hasil Usaha Desa

Merupakan hasil dari Usaha-Usaha yang dimiliki oleh sebuah Desa yang merupakan beberapa hasil dari pengelolaan Badan usaha milik Desa (BUMDES), bagian keuntungan atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara BUMN, atau perusahaan milik daerah BUMD dan perusahaan swasta yang bekerja sama bersama pemerintah Desa.

b. Hasil kekayaan Desa

Setiap desa di suatu wilayah memiliki kekayaan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap desa itu sendiri, dari

pendapatan tersebut menghasilkan sebuah pendapatan yang disebut Pendapatan Asli Desa.

c. Hasil Swadaya Dan Partisipasi

Dalam melaksanakan sebuah pembangunan, masyarakat dapat berpartisipasi untuk ikut melaksanakan sebuah pembangunan. Partisipasi tersebut dapat berupa tenaga maupun materi. Dengan kata lain swadaya dan partisipasi merupakan usaha untuk membangun dengan kekuatan sendiri, yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk uang dan barang yang dinilai dengan uang.

d. Hasil Gotong Royong

Gotong royong merupakan membangun dengan kekuatannya yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan uang. Budaya gotong royong di desa masih sangatlah kuat, jika dinilai dengan materi jumlahnya tidaklah sedikit, misalkan dalam pembangunan sebuah jembatan, masyarakat akan sukarela membantu jalannya sebuah pembangunan tersebut, bahkan menyediakan makanan untuk pekerjaan tersebut.

e. Lain lain Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah;

Untuk dalam hal ini antara lain terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan desa yang sah dan telah di bahas bersama masyarakat sebagai suatu urusan tertentu.

2. Bantuan Pemerintah Kabupaten Yang meliputi;

a. Bagian perolehan Retribusi dan Pajak Daerah;

Merupakan bagian dari bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang besarnya di sesuaikan dengan pendapatan saat itu. Setiap daerah pasti berbeda beda sesuai dengan pendaptannya.

b. Bagian dari Dana perimbangan keuangan pusat dan Dearah.

3. Bantuan Pemerintah Pusat Dan Provinsi;

Bantuan ini diberikan oleh pemerintah sebagai suatu program tertentu dan pelaksanaannya diatur dan di tetapkan dalam Undang-Undang. Untuk nilainya jumlahnya fluktuatif sesuai dengan program apa saja yang akan dilaksanakannya.

4. Sumbangan Dari Pihak Ketiga

Desa dapat menerima bantuan atau sumbangan dari lembaga lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tidak ada maksud tertentu dan semuanya dapat dipertanggung jawabkan.

5. Pinjaman Desa

Desa bisa bekerja sama dengan pihak lainnya baik sesama desa ataupun dengan beberapa lembaga lainnya untuk meminjam dana untuk melaksanakan sebuah pembangunan.

6. pemilikan Dan Pengelolaan,meliputi;

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan ysng telah di kelola oleh desa tidak dibenarkan untuk diambil oleh pemerintah (pusat) ataupun pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan sebuah desa dilakukan antara lain dengan mendirikan sebuah

badan usaha desa (BUMDES) , kerjasama dengan pihak ketiga dan wewenang untuk melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun hasil dari retribusi yang telah di pungut juga tidak dibenarkan untuk diambil oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari sumber sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan yang pembagiannya dilakukan secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya yang terlalu tinggi dan menghindari dampak dampak yang tidak diinginkan lainnya.

- b. Kegiatan pengelolaan APBdes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan suatu anggaran,

Pendapatan Asli Desa merupakan sebuah pendapatan yang berasal dari kewenangan suatu yang bersekala lokal Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

1. Hasil usaha Desa;
2. Hasil Kekayaan Desa;
3. Hasil swadaya dan partisipasi;
4. Hasil gotong royong;
5. Lain lain pendapatan Asli Desa Yang sah.

Dalam hal ini pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kemandirian sebuah Desa dan berperan penting dalam sebuah perokonomian sauat daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan dari otonomi Daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan sebuah otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah dalam hal ini yang di fokuskan adalah

Desa dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah daerah maupun ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa merupakan otoritas tertinggi di Desa yang bertugas untuk melakukan berbagai usaha ataupun upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka mendukung keberhasilan dan pengurusan kepentingan masyarakat Desa, serta penyelenggaraan pembangunan yang adil dan merata.

Untuk mendorong upaya atau kinerja dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa maka diperlukan sebuah strategi kebijakan pengembangan ekonomi sebuah Desa. Strategi kebijakan ini dapat dilihat karakteristik, potensi, geografi dan kebutuhan dari Desa yang bersangkutan. Strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan sebuah ekonomi Desa bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan aksesibilitas, pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan maupun mengembangkan suatu kelangsungan kegiatan usaha, dan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan daya tarik desa sehingga membuka pihak lain atau swasta untuk melakukan sebuah investasi Desa.

Senada dengan adanya otonomi Desa maka dalam hal ini seharusnya membuka peluang bagi setiap desa dalam melakukan manajemen terhadap aset Desa, dan kekayaan desa guna mendapatkan sebuah pendapatan bagi Desa dan tidak bergantung terhadap pemerintah. Sebuah aset ataupun kekayaan desa jika di kelola dengan baik oleh pemerintah desa maka akan membuka jalan menuju sebuah desa yang mandiri.

Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang terdiri dari 12 kecamatan 14 kelurahan dan 104 Desa dan dengan batas wilayah sebelah utara-kabupaten siak (kecamatan sungai apit dan kecamatan sungai siak); kabupaten bengkalis (kecamatan tebing tinggi) kecamatan terluas adalah kecamatan teluk meranti dan yang paling kecil adalah kecamatan pangkalan kerinci ,

Tabel 1. jumlah kelurahan/Desa menurut kecamatan di kabupaten pelalawan .

kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah	Jumlah RT	Jumlah Rw
Langgam	1	7	8	125	45
Pangkalan kerinci	3	4	7	225	51
Bandar sei kijang	1	4	5	69	28
Pangkalan kuras	1	16	17	266	78
Ukui	1	11	12	212	59
Pangkalan lesung	1	9	10	153	59
Bunut	1	9	10	101	48
Pelalawan	1	8	9	119	47
Bandar petalangan	1	10	11	114	53
Kuala kampar	1	9	10	164	62
Kerumutan	1	9	10	171	62
Teluk meranti	1	8	9	121	53
Jumlah	14	104	118	1.840	645

Sumber: Badan pusat statistik kabuoaten pelalawan 2016

Kecamatan kerumutan merupakan sebuah kecamatan yang berada di kabupaten pelalawan , kecamatan kerumutan yang dengan pusat pemerintahannya berada di kelurahan kerumutan dan kurang lebih berjarak 90,20 km dengan pusat pemerintahan kabupaten pelalawan jika ditempuh dengan melalui perjalanan darat. (badan pusat statistik kabupaten pelalawan,2014)Kecamatan kerumutan adalah kecamatan yang terdiri dari 1 kelurahan dan terdiri dari 9 Desa . adapun desa yang ada di kecamatan kerumutan dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Desa atau kelurahan di kecamatan Kerumutan

NO	Nama desa/kelurahan	Status pemerintahan	Status hukum
1	Bukit lembah subur	Desa	Definitif
2	Banjar panjang	Desa	Definitif
3	Kerumutan	Kelurahan	Definitif
4	Beringin makmur	Desa	Definitif
5	Pematang tinggi	Desa	Definitif
6	Pangkalan tampoi	Desa	Definitif
7	Pangkalan panduk	Desa	Definitif
8	Tanjung air hitam	Desa	Definitif
9	Mak teduh	Desa	Definitif
10	Lipai bulan	Desa	Definitif

Sumber: kantor Desa/Kelurahan se Kecamatan kerumutan

Desa beringin makmur merupakan Desa yang berada di kecamatan kerumutan yang berjarak berjarak 8 km dari pusat pemerintahan kecamatan kerumutan . desa beringin makmur terdiri dari 3 dusun ,6 Rukun warga dan 23 rukun tetangga dan jumlah penduduk Desa Beringin Makmur berjumlah 2.527 jiwa dan 726 kepala keluarga.

Luas wilayah Desa Beringin Mamur Adalah 1.447,5 ha dengan geografi berupa dataran sebesar 70% atau seluas 1.014 ha, dan 30% dengan kontur berbukit atau seluas 433,5 ha.

Penduduk Desa beringin makmur berasal dari daerah yang berbeda beda dan mayoritas penduduk terbesar berasal dari suku jawa yang berjumlah 2318 jiwa, suku batak yang berjumlah 47 jiwa, suku melayu berjumlah 71 jiwa, suku sunda 41 jiwa, dan suku madura berjumlah 20 jiwa.

Desa Beringin Makmur merupakan desa yang terbilang maju dalam segi pembangunan, hal ini terlihat sebagaimana jalan desa beringin makmur yang

secara keseluruhan telah menggunakan semenisasi dan aspal. Pembangunan jalan yang merata secara keseluruhan akan menjadikan salah satu indikator dari kemajuan sebuah desa. Desa beringin makmur juga memiliki beberapa aset yang seharusnya bisa di gunakan untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa, sumber pendapatan Asli Desa dapat diperoleh melalui potensi-potensi yang dimiliki desa jika pengelolaan dilakukan dengan baik. Aset yang dimiliki oleh Desa beringin Makmur yaitu Badan usaha Desa(BUMDES BINA USAHA) Dan Pasar Desa serta tanah kas Desa yang berpotensi untuk mendapatkan pemasukan bagi desa atau meningkatkan pendapatan asli desa beringin makmur. Dalam Hal ini pemerintah desa sangat berperan dalam menentukan sebuah strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Adapun upaya atau strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa beringin makmur adalah sebagai berikut:

1. Penambahan usaha baru BUMDes yang berupa usaha percetakan
2. Penarikan pajak retribusi tanah bengkok yang telah di kelola oleh masyarakat yang di lakukan dalam sebulan sekali.

Perlu diketahui bahwa beberapa strategi tersebut merupakan sebuah upaya dari pemerintah desa beringin makmur dan hanya sebagai “stimulan” untuk meningkatkan pendapatan asli desa selain dari hasil aset aset yang telah dimiliki oleh desa yaitu BUMDES,Pasar Dan tanah khas desa berupa perkebunan sawit. Maka dapat di peroleh sebuah pendapatan asli desa sebagai berikut:

Tabel III.1 hasil pendapatan Asli Desa Beringin Makmur dalam 4 Tahun terahir:

NO	TAHUN	HASIL/PENDAPATAN
1	Tahun 2016	Rp 7.500,000,00
2	Tahun 2017	Rp 33.600,000,00
3	Tahun 2018	Rp 30.300,000,00
4	Tahun 2019	Rp 20.400,000,00

Sumber: keuangan pemerintah desa beringin makmur

Berdasarkan tabel pendapatan asli desa diatas maka, dapat kita lihat bersama bahwa hasil sudah ada peningkatan atau penguatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 namun masih berfluktuatif pada tahun yang selanjutnya . dan hasil per tahun yang didapatkan dirasa belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pemerintah desa beringin makmur , selama ini dari hasil pendapatan asli desa hanya digunakan untuk peringatan hari hari besar keagamaan, hari hari besar nasional serta beasiswa untuk anak anak berprestasi di tingkat sekolah dasar. Di dalam permasalahan yang telah di paparkan ,penulis melakukan penelitian hasil pendapatan pada tahun 2019 di karenakan terjadi sebuah *resesi/* kemrosotan nilai pendapatan di tahun 2018 ke tahun 2019.

Dalam hal ini untuk melihat strategi pemerintah Desa Beringin Makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan, maka peneliti menggunakan teori dari David .J Hunger dan Thomas L Wheelen yang menyatakan strategi memiliki dasar dasar pokok yang meliputi:

- a. Mengamati lingkungan
- b. Penyusunan strategi
- c. Pelaksanaan strategi

d. Evaluasi atau control.

Yang dimana teori teori tersebut untuk melihat dan menentukan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Beringin Makmur agar sesuai dengan tujuan yang akan di capai yaitu meningkatkan hasil pendapatan asli Desa dengan memperhatikan potensi yang ada, sehingga hasil yang di dapat nantinya bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memaparkan beberapa fenomena yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya penyusunan strategi melalui kebijakan kebijakan ataupun sebuah program dalam rangka pengembangan skala menengah maupun dalam skala jangka panjang dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES yang saat ini hanya mengandalkan dari usaha unit fotocopy ,unit lpg dan unit simpan pinjam. pengembangan usaha diperlukan agar supaya usaha yang dimiliki Desa bervariasi dengan memperhatikan kebutuhan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar.
2. Kurangnya strategi dan control terhadap pengelolaan pasar Desa yang sebagaimana lokasi yang seharusnya digunakan untuk lapak pedagang pasar justru digunakan sebagai rumah permanen, pengelolaan pungutan uang pasar yang justru tidak dikelola dan dilakukan langsung oleh pihak desa dan justru di kelola oleh pihak lain.
3. kurangnya evaluasi dari pihak pemerintah Desa Beringin Makmur terhadap hasil kepemilikan aset maupun usaha, dan kurangnya evaluasi terhadap sedikitnya jumlah PADes yang dihasilkan oleh desa beringin

makmur, sehingga hasil PADes di setiap tahunnya masih sedikit dan kurang mengalami peningkatan tidak sampai dalam penggunaan pembangunan fisik yang ada di desa.

Dari permasalahan yang di uraikan diatas seharusnya pihak pemerintah desa melakukan beberapa tindakan dan strategi untuk mengelola potensi yang ada di desa dalam rangka untuk meningkatkan dan menambah nilai tambah pemasukan bagi desa beringin makmur. Strategi pemerintah desa sangat menentukan sebuah desa dalam mencapai tujuan yaitu menjadikan desa sebagai desa mandiri dan tidak selamanya tergantung dengan dana bantuan pemerintah , adapun bantuan pemerintah dapat diposisikan bahwa bantuan pemerintah sebagai fungsi panjang bantuan bantuan yang di terima dari pemerintah pusat maupun daerah hanya merupakan stimulan sebgaai upaya untuk mendorong semangat dan partisipasi dari masyarakat guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan Desa .

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut dan mengacu kapada perumusan masalah peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rencana/strategi dari pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan

2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat perencanaan/strategi pemerintah desa beringin makmur.

C. tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui strategi apa saja yang akan di lakukan oleh pemerintah Desa Beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari rencana/strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Beringin Makmur.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Akademik yaitu penelitian yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi kalangan akdemis yang ingin meneliti hal yang sama.
 - b. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan dari ilmu pemerintahan .
 - c. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Desa Beringin makmur.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. konsep pemerintahan

Mengacu kepada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit yang artinya tugas dan wewenang pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk badan-badan dalam kegiatan pemerintah itu sendiri.

Menurut syafie (1998:18) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan kepengurusan (eksekutif pengaturan legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pemerintah pusat dengan daerah antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagi peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Dan dengan pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintah itu sendiri ditengah tengah masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi sebagai memenuhi dan melindungi kebutuhan dan

kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari sudut ,sudut pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat di trima oleh yang bersangkutan pada saat yang di butuhkan) berdasarkan dari definisi itu dapat di konstruksikan ruang lingkup pemerintahan terdiri dari:

1. Yang di perintah
2. Tuntutan yang di perintah
3. Pemerintah
4. Kewenangan,kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintah

Menurut suryaningrat (1978:2) pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dalam melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (nugroho,2003.36).

Menurut Ndraha menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat lebih subjektif adapun fungsi pemerintahan ada tiga yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan yang terahi fungsi pelayanan.

Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas tugas pokok pemerintahan adalah:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang mengakibatkan penggulingan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi segenap masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Ndraha (2003:76) menyatakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu fungsi primer dan fungsi skunder. Dimana fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah.

Artinya fungsi primer tidak berkurang dengan meningkatnya suatu kondisi ekonomi ,politik dan sosial masyarakat; semakin meningkatnya kondisi yang diperintah maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak di privatisasikan dan

layanan civil termasuk dalam layanan yang berbentuk birokrasi. Kedua fungsi tersebut dapat disingkat sebagai pelayanan (serving). Fungsi pelayanan ini bersifat universal atau menyeluruh yang dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia baik dalam negara yang sudah maju maupun dalam negara yang masih berkembang, yang sesuai dengan kondisi masing masing.

Fungsi ini juga telah banyak di bahas dan di pelajari oleh kalangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora dan diaplikasikan secara luas, baik di bidang privat, publik maupun sosial. Dan fungsi skunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi , politik, dan sosial yang di perintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup , semakin kuat pula *bargaining position* dan semakin interaktif pula masyarakat yang diperintah , semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Fungsi pemerintah secara umum adalah (Musyena,1922;22)

- a. Menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan
- b. Pembangunan dan
- c. Pembinaan masyarakat

Selain itu dapat juga diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagaimana melaksanakan pengurusan dan pengaturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sampai ke Desa dan kelurahan dalam berbagai peristiwa dan segala pemerintahan yang baik dan benar(syafiie,1998.53).

2. konsep Desa

Sejarah Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum negara kesatuan republik Indonesiaterbentuk. Negara republik Indonesia

menghormati kedudukan daerah daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah daerah yang mengingati hak asal usul daerah tersebut.

Apabila ditinjau dari keberadaan kata “Desa” makna kata Desa menurut pandangan sotardjo dalam rahyunir dan maulidiah,(2016:390) berasal dari bahasa india yakni ”swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tempat leluhur yang merujuk kepada kesatuan hidup , dengan satu kesatuan norma dan memiliki suatu batas yang jelas. “Soetardjo” mengatakan bahwa desa di indonesia pertama kali di temukan oleh Mr. Herman Warner Muntinge. Seorang warga belanda anggota dari raad van indie pada masa penjajahan kolonial inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di indonesia. Pada sebuah laporannya pada tanggal 18 juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkannya dengan jelas adanya di temukannya sebuah desa-desa di daerah pesisir utara pulau jawa dan dalam perkembangannya di kemudian hari ditemukannya juga Desa-Desa di kepulauan luar jawa yang kurang lebih keberadaannya sama dengan Desa-Desa yang berada di pulau jawa.

Sehubungan dengan keberadaan Desa , wasistiono dan tahir dalam rahyunir (2015:1) menyatakan “kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan yang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa maka desa merupakan mata rantai yang terlemah . hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konsatalasi pemerintahan. Padahal Desa-lah yang menjadi pertautan terahir dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan ahir yang telah digariskan sebagai cita cita bersama.

Menurut Nurcholis (2011:1) Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroprasinya pelayanan pemerintahan dan pemerintah kabupaten /kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa merupakan wilayah dengan batas batas tertentu sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengurus dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan hak dan asal usulnya. Jumlah desa yang saat ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2015 sebanyak 74.093 dan kelurahan berjumlah sebanyak 8.412.

Dalam sejarahnya pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa , yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 Tentang pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang pokok pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang pokok pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan,
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka untuk ketiga kalinya desa kembali diatur dengan Undang-Undang tersendiri setelah untuk pertama kalinya desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja dan kedua desa diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1970 tentang pemerintahan Desa. Kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat karena selama ini pengaturaan tentang Desa disatukan kedalam Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah.

Berbagai pengertian dan definisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari kalangan dan dari berbagai disiplin ilmu . dan masing masing pengertian desa tersebut memiliki adanya berbagai perbedaan perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa dan pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli dalam memandang dan menggambarkan serta menilai tentang desa tersebut.

Menurut P.J Bourmen (Nurcholis:4) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang dan hampir semuanya saling mengenal satu sama lain;kebanyakan yang hidup didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya. Usaha usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam . dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan ikatan keluarga yang rapat dan erat, ketaatan kaidah kaidah sosial.

Menurut unang sunarjo dalam rahyunir dan maulidiah (2015;10) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat karena unsur seketurunan maupun karena sama sama meliki kepentingan politik,sosial, dan keamanan dll. Memiliki sebuah susunan pengurus yang telah dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Sedangkan arti dan pengertian tentang desa berdasar kan pasal 1 poin satu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Desa" adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan Desa disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat,. Sebutan lain untuk desa misalnya "*huta/nagori*" di sumatera utara "*gampong*" di aceh, "*nagari*" di minangkabau, "*marga*" di sumatera bagian selatan, "*tiuh*" di lampung "*desa pakraman/desa adat*" di bali "*lembung* di toraja "*banua*" di kalimantan "*negeri*" di maluku , dan "*kampung*" di riau kususnya di kabupaten siak.

3. konsep Pemerintah Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang dalam wadah sebuah sekretariat desa, dan unsur pendukung sebuah tugas dari kepala desa dalam proses pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala urusan umum
- c. Kepala urusan pemerintah
- d. Kepala urusan ekonmi pembangunan
- e. KAUR KESRA (kesejahteraan rakyat)
- f. Kepala urusan keuangan
- g. Kepala dusun (kadus)
- h. BPD (badan perwakilan desa)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 menyebutkan:

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa ,melaksanakan pembangunan desa , dan pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - j. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
 - n. Mewakili desa dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,

Menurut widjaja (2003;3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Menurut yulianti (2003:24) desa adalah tempat asal ,tempat tinggal negara asal,tanah leluhur yang merujuk kepada kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Bintarto dalam wasistiono & Tahir (2006:10,11) unaur-unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah;

1. Daerah , dalam arti tanah tanah yang produktif dan yang tidak produktif merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah ,pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencarian para penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan , dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan ikatan pergaulan warga desa.

Kebijakan pengembangan otonomi desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/kota, propinsi dan Nasional yang telah dituangkan kedalam berbagai dokumen perencanaan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam rangka untuk mewujudkan akselerasi tersebut dilaksanakan melalui 4 misi yang telah dirumuskan sebagai berikut : (wasistiono & Tahir,2006;98)

1. Meningkatkan kapasitas tata kepeimpinan
2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
3. Meningkatkan kapasitas tata kemasyarakatan
4. Meningkatkan kapasitas tata ruang dan lingkungan

Penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan asas asas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan , kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa .

- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. Efektifitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan efisiensi merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan awal.
- i. Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam proses penetapan sebuah kebijakan harus memperhatikan dasar kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat desa
- j. Keberagaman, adalah asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok kelompok masyarakat tertentu
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Dalam membantu kepala desa dalam menjalankan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa , maka di desa dibentuk perangkat desa yang terdiri atas:

- a. Sekretariat desa yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa
- b. Pelaksana kewilayahan yang dikenal dengan sebutan kepala dusun
- c. Pelaksana teknis yang dikenal dengan sebutan staff

Maka unsur perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam proses menyelenggarakan tugas tugas dan wewenang dari kepala desa . orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh camat atas nama bupati atau walikota . oleh karenanya perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada kepala desa .

Kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 18 adalah:

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul dan adat istiadat.

Dan dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah , pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh atau beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

4. konsep strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (*stratus* = militer ; dan *ag* = memimpin) yang artinya adalah seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert jr (2001) . konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan 2 perspektif yang berbeda:

- a. Perspektif apa suatu organisasi dilakukan
- b. Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan.

Pada perspektif yang pertama , strategi dapat diartikan sebagai suatu program untuk menentukan dan untuk mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Yang artinya bahwa manajer memainkan peranan yang sangat penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan sebuah strategi bagi organisasi. Sedangkan yang berdasarkan kepada perspektif yang ke dua , strategi dapat di definisikan atau di artikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap suatu lingkungannya sepanjang waktu . pada artian tersebut menggambarkan bahwa setiap organisasi pasti memiliki sebuah strategi.

Setiap organisasi baik itu suatu organisasi bisni, yayasan, sosial maupun organisasi publik pasti membutuhkan sebuah strategi agar organisasi tersebut dapat bertahan dan berkembang secara terus menerus. Organisasi publik memiliki tanggung jawab dalam melayani masyarakat untuk tetap hidup dan berkembang.

Strategi menurut marrus dalam umar (2008:31) mendefinisikan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus kepada tujuan jangka panjang suatu organisasi , disertai penyusunan suatu cara dan upaya bagaimana agar tujuan itu tercapai dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian strategi menurut para pakar ahli diatas bahwa dapat ditarik sebuah kesimpulan sederhana mengenai strategi . secara singkat strategi diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan ,kemenangan atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu organisasi maupun dalam lembaga.

Jadi, berdasarkan judul peneliti , berdasarkan fenomena-fenomena yang ada ,penyebab utama dari kurang maksimalnya penghasilan ”pendapatan asli desa” dikarenakan kurangnya pengembangan dari potensi yang ada di desa. Oleh karena itu terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa strategi yang harus dilaksanakan

menurut David J Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:18) menyatakan bahwa strategi manajemen memiliki dasar dasar pokok yang meliputi:

- a) Mengamati lingkungan, mengamati lingkungan adalah kegiatan memonitoring faktor internal dan eksternal melalui konsep kekuatan , kelemahan, kesempatan dan ancaman.

- b) Penyusunan strategi, penyusunan strategi membahas mengenai pengembangan rencana jangka panjang seperti penentuan visi dan misi , tujuan yang akan dicapai .mengembangkan strategi yang diwujudkan melalui suatu program .
- c) Pelaksanaan strategi, pelaksanaan strategi merupakan wujud dari penerapan kebijakan kebijakan yang telah di tentukan melalui pengembangan program, budget dan pelaksanaan strategi pada setiap organisasi dapat berbeda beda tergantung dengan keadaan lingkungan sebuah organisasi.
- d) Evaluasi atau kontrol, untuk mengetahui apakah organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang disusun maka, organisasi perlu sebuah pengawasan baik dari keanggotaan atau pihak internal maupun pihak ketiga.

Di dalam dimensi pengamatan lingkungan Pearce dan Robinson (2008,299) dalam buku strategi manajemen mengungkapkan bahwa :

Kekuatan adalah merupakan sumberdaya dalam hal ini mencakup keuangan atau finansial dan keunggulan spesifik yang dimiliki oleh seseorang ,kelompok,organisasi,perusahaan maupun kelembagaan.

Kelemahan, adalah sebuah keterbatasan atau kekurangan kemampuan yang dapat menghambat dari proses kemajuan organisasi.

Ancaman, adalah suatu keadaan yang tidak menguntungkan , dan situasi ini dapat diatasi tergantung bagaimana cara perusahaan,lembaga mengatasinya.

Dalam cakupan dimensi penyusunan strategi di sebutkan penentuan visi dan misi dalam hal ini Cristhoper Bart (2000:1) mengungkapkan pernyataan bahwa visi dan misi yang baik menyajikan sebuah keunikan dalam lingkungan organisasi , alasan keberadaan dan mendorong dari berbagai kelompok atau stakeholder untuk mencapai tujuan bersama .pernyataan misi yang baik

memungkinkan untuk pengalokasian sebuah sumberdaya yang berfokus kepada organisasi .apa bisnis kita ? mengapa kita disini? Dan apa yang akan kita dapatkan?

Dalam cakupan pelaksanaan strategi, evaluasi dan control Hansen & Otley (2003:95;116) mengungkapkan bahwa anggaran adalah landasan dari proses pengendalian sebuah manajemen sehingga organisasi mengenali anggaran sebagai suatu bentuk pengendalian manajemen. Menurut Weleh (2000:5) pengawasan atau pengendalian bisa diartikan sebagai sebuah proses untuk mengukur dan menilai kinerja dari setiap bagian organisasi kemudian melakukan beberapa aksi atau tindakan yang sekiranya di perlukan.

5. konsep organisasi

Dalam pelaksanaan sebuah administrasi maupun pelayanan, organisasi merupakan tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan masing masing tugas dan fungsinya . administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktivitas organisasi. Tanpa adanya sebuah administrasi dalam sebuah organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi di dalamnya , maka tujuan organisasi akan sulit di capai secara efektif dan efisien.

Zulkifli (2005:73) menyatakan bahwa konsep organisasi merupakan sebagai wadah untuk proses pelaksanaan kerja sama , dan juga mencakup rangkaian dari aktivitas pembagian tugas, penunjukan staff, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka dan upaya pencapaian sebuah tujuan yang di inginkan , selanjutnya Zulkifli (2005:131) juga mengatakan bahwa

sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya merupakan bersifat dinamis dan juga terbuka . terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan eksternal.

Siagian (2008:95) mengatakan bahwa organisasi merupakan sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam satu tujuan bersama dan terikat secara formal , yang mana selalu terdapat hubungan antara orang yang disebut dengan pemimpin dan seorang yang disebut dengan bawahan.

Atmosudirjo dalam wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari pernyataan para ahli tersebut maka organisasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain:

a. Organisasi sebagai wadah

Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk beraktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Siagian (2008:96) memberikan sebuah penjelasan organisasi sebagai wadah yang sifatnya relatif statis , karena tidak ada satu organisasi yang berkembang tumbuh dan maju yang berada dalam keadaan absolut statis.

b. Organisasi sebagai suatu proses

Organisasi merupakan suatu proses interaksi dan hubungan antara individu dan individu di dalam organisasi yang dalam rangka melaksanakan sebuah kerjasama . dimana masing masing individy tersebut mempunyai tujuan kerja masing masing untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama .

c. Organisasi sebagai alat dalam mencapai tujuan

Organisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan , dan tujuan organisasi akan tercapai apabila tiap tiap individu yang berada dalam suatu organisasi tersebut mempunyai kesadaran akan tugas dan wewenangnya sehingga tujuan organisasi tersebut dapat mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang diinginkan dan ditetapkan bersama. Tiap tiap individu dalam organisasi juga dituntut berkompeten dalam melakukan tugas dan wewenangnya sehingga dalam proses melaksanakan tujuan bisa berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir kendala kendala yang dihadapinya nanti baik kendala eksternal maupun di tingkat internal dalam sebuah organisasi.

Jadi sangat jelas bahwa organisasi merupakan sebuah tempat ataupun sebuah wadah untuk menjalankan beberapa kegiatan administrasi , baik itu organisasi yang berasal dari sebuah pemerintah maupun organisasi swasta . yang mana di dalam suatu organisasi selalu terjadi sebuah proses saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan bersama sama. Dan organisasi juga merupakan alat terbaik bagi suatu individu

maupun suatu kelompok dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan tujuan tertentu.

6. konsep manajemen

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan sebuah tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian sebuah tujuan melalui proses kegiatan kegiatan orang lain.

Menurut Zulkifli (2005:28) yang mendefinisikan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan , meng-organisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sebuah sasaran organisasi yang telah ditetapkan . sedangkan menurut Siagian (2005:5) memberikan batasan mengenai manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang orang ke arah tujuan organisasional atau maksud maksud yang nyata , dengan kata lain manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaan disebut manajer atau pngelola.

Menurut terry dalam sufian (2003:16) menyatakan bahwa manajemen adlah proses yang khas yang terdiri dari tindakan pelaksanaan atau planning, organizing, aktiviting atau aktivitas dan controlling atau pengawasan yang dimana di masing masing sebuah bidang digunakan baik dalam ilmu pengetahuan maupun kahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha untuk mencapai sebuah sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Millet dalam Sufian (2003:15) manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika proses kerja sama manusia atau melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Gibson dalam Monang (2009:3) manajemen adalah sebagai suatu proses yakni sebagai suatu rangkaian kegiatan atau tindakan pekerjaan yang mengarah kepada beberapa sasaran dan tujuan tertentu.

Implikasi manusia adalah unsur terpenting dalam menjalankan organisasi serta mengupayakan pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan itu secara efektif dan efisien serta menegdepankan fungsi manajemen yang ada. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manajemen bisa dilihat sebagai sebuah aktivitas, aktivitas yang dimaksud adalah untuk memadukan dan mengatur semua sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Pengaturan yang dimaksud dilakukan terhadap sumber daya yang terdiri dari 6M yaitu *Man, money, material, machine, methods, dan market*.

Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian yang disebutkan di atas maka manajemen bisa dikatakan sebagai suatu proses atau kegiatan orang-orang dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan oleh sekelompok manusia dalam suatu organisasi dan telah ditetapkan dan disepakati bersama.

7. konsep manajemen pemerintah

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain dalam rangka pemenuhan pencapaian tujuan.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang sudah ditetapkan , manajemen memiliki beberapa unsur diantaranya yaitu:

- a. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang ber-kompeten.
- b. Fungsi, perencanaan usaha termasuk penetapan output outcome yang telah dikehendaki, pengorganisasian dilakukan agar sumber sumber agar siap pakai atau digunakan, penggunaan sumber sumber guna menghasilkan output dan kontrol/pengawasan penggunaan supaya output dan outcome yang dihasilkan dapat dinikmati oleh konsumen.
- c. Siklus produk yang berasal dari konsumen dan telah melalui beberapa proses dan berahir kepada konsumen.

Sedangkan Terry dalam (sarwanto 1999,62-63) mengatakan ada 4 pokok rangkaian kegiatan manajemen yang terdiri dari:

- a. Planning adalah menetapkan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh para anggot anggota organisasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan , dalam proses ini perlu ditetapkan oleh seorang manajer tentang bagaimana dan seperti apa pekerjaan ini dilakukan.
- b. Organizing adalah mendistribusikan atau menentukan tugas tugas kepada para nggota kelompok organisasi .

- c. Actuating setelah kegiatan planning dan organizing dilakukan seorang manajer harus melakukan penggerakan kelompok secara efektif dan efisien.
- d. Controlling adalah dalam suatu organisasi yang berjalan , manajer harus selalu mengadakan pengendalian dan pengawasan agar tindakan tindakan yang berorientasi terhadap berjalannya suatu organisasi benar benar sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya baik mengenai cara maupun arah.

Menurut ott Hyde dan Shafrits (1991:10) manajemen pemerintahan adalah bagian utama dari kajian administrasi negara yang sanagat luas, manajemen pemerintahan berkaitan dengan fungsi fungsi dan proses manajemen pada bagian disemua tingkatan pemerintahan sebaagai sektor nirlaba.

Dalam Wasistiono (2001:120) ada lima kecenderungan berbicara tentang manajemen pemerintahan itu sendiri yaitu:

1. Dilihat dari peranan pemerintahan
2. Dilihat dari visi dan misi
3. Dilihat dari fungsi organisasi
4. Dilihat dari fungsi fungsi manajemen
5. Dilihat dari kepemimpinan.

Menurut clinton dalam (wasistiono 2001) penyelenggaraan pemerintahan yang di kreasikan sebagai suatu instrumen daripada kepentingan masyarakat kembali kepada nilai nilai fundamental. Manajemen pemerintahan indonesia pada abad 21 harus tetap berpegang terhadap nilai nilai fundamental agar tidak

kehilangan jati diri sebagai bangsa yang besar. Berbagai asas , teori dan konsepsi pemikiran yang berlaku pada manajemen secara umum dapat pula digunakan untuk manajemen pemerintahan indonesia dengan rambu rambu pancasila sebagai nilai fundamental.

Manajemen pemerintahan menurut Rasyid (2000;148) adalah manajemen yang diarahkan agar terlebih dahulu merumuskan hasil apa itu dengan kata lain tujuan apa yang akan dicapai dengan ruang, peralatan, keahlian dan tenaga kerja yang kemudian dilaksanakan . selanjutnya hasil akan di evaluasi untuk menentukan apakah tujuan itu tercapai atau tidak. Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip prinsip manajemen pada umumnya yaitu efisiensi , efektivitas dan inovasi dalam proses penghimpunan dan menggerakkan orang orang , memperoleh dan menggunakan uang , serta mengadakan mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapainya sebuah tujuan.

8. Konsep Keuangan Desa

Untuk menyelenggarakan sebuah roda pemerintahan baik itu pada tingkat pusat maupun kepada sub pemerintahan yang terendah yaitu pemerintahan Desa tentunya memerlukan sumber daya keuangan untuk membiayai proses pelaksanaan pemerintah tersebut , baik itu pada bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan . menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa .

Sedangkan menurut Nurcholis (2011:81) mengatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang , termasuk di dalamnya berbentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Dari beberapa pendapat dan sumber diatas disimpulkan bawa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desas berdasarkan kekayaan yang telah dimiliki oleh desa dapat dinilai dengan uang sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan sebuah desa.

Kemudian Nurcholis menambahkan keuangan desa bersal dari pendapatan asli desa, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa meliputi APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah desa di danai dari APBD sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah desa di danai oleh APBN. (Nurcholis ,2011;81).

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dari mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa, maka untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan berdasarkan prinsip tatakelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan cara tertib dengan disiplin anggaran

Kemudian Nurcholis (2011,82) mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis keuangan desa

(PTPKD) yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sekretaris desa bertindak sebagai koordinaor dan bertanggung jawab kepada kepala desa , pemegang kas adalah bendahara, pendapat tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris sebagai koordinator yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kelembagaan desa.

9. Konsep Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah dapat berupa pasar desa, tanah kas desa, tanah ulayat, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil hutan, hutan milik desa , mata air milik desa, pemandian umum dan asset lain yang dimiliki desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kelompok pendapatan asli desa dalam pasal 11 ayat 2 terdiri dari:

- a. Hasil usaha
- b. Hasil aset
- c. Hasil swadaya , partisipasi dan gotong royong
- d. Pendapatan asli desa lain.

Menurut A.W Widjaja (2003 ;131) pendapatan asli desa merupakan pendapatan desa yang dihasilkan dari sumber sumber asli desa dan peran peran serta masyarakat.

Mengenai pendapatan desa, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa atau yang disingkat dengan(PADes) adalah pendapatan yang berasal dari

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Desa juga mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan Desa serta pembangunan di era Reformasi ini desa dituntut bukan hanya sekedar menunggu sumber pendapatan Desa yang lebih di tetapkan oleh pemerintah tetapi desa diharapkan bisa berinovatif untuk memenuhi kebutuhan desa sendiri, sehingga dapat mendukung pemerintah daerah dalam membangun keberdayaan daerah itu sendiri.

dalam hal ini Pemerintah Desa, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan otoritas tertinggi di desa yang bertugas untuk melakukan berbagai usaha ataupun strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau (PADes) dalam rangka mendukung sebuah keberhasilan dari pengaturan dan pengurusan kepentingan dari seluruh masyarakat Desa, serta penyelenggaraan pembangunan desa yang adil dan merata demi tercapainya indikator pemerintahan yang baik, yang menjadi tujuan diterapkannya dari otonomi Desa.

Pendapatan Asli Desa merupakan sumber pendapatan yang juga sangat diperlukan guna memperkuat keungan desa dalam sebuah pengelolaan maupun dalam rangka melaksanakan sebuah pembangunan desa baik itu secara fisik maupun pembangunan yang berupa non fisik. Jika pendapatan asli desa bisa

ditingkatkan dan meningkat secara keseluruhan maka desa akan mendapatkan dana pengeloan maupun pembiayaan yang di butuhkan oleh desa tersebut. Sehingga hal tersebut akan mewujudkan sebuah kemandirian sebuah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, desa tidak hanya menunggu pembangunan ataupun bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .

10. konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sejarah berdirinya BUMDES yaang berawal dari UED-SP yang sudah beroperasi dalam 3 tahun dan sudah dianggap mandiri . ketika masih berbentuk UED-SP lembaga masih didampingi oleh tim pendamping dari pemkab sampai lembaga tersebut menjadi BUMDES.

Di dalam undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan pada pasal 78 bahwa ,

1. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar ,pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.
3. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan , kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewjutkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

BUMDES merupakan suatu wahana yang dimiliki Desa untuk menjalankan sebuah usaha di Desa, yang dimaksud dengan usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, usaha jasa angkutan, listrik desa dan usaha sejenis lainnya
2. Penyaluran 9 bahan pokok ekonomi desa
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis
4. Industri dan kerajinan rakyat desa

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta atau pemberi modal terbesar kepada BUMDES diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan pihak ketiga. Disini juga pemerintah desa juga ikut berperan aktif dalam pembentukan sebuah BUMDES sebagai suatu badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa;

1. Pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah Desa
2. Pendirian BUMDES ditetapkan dengan peraturan Desa.

B. Penelitian terdahulu

Tabael II.1 Penelitian Terdahulu Tentang Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Strategi pemerintah Desa Dalam Mengupayakan Pendapatan Asli Desa. selfinus juniario. (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. sama sama meneliti tentang pendapatan asli desa. 2. Sama sama meneliti tentang strategi yang di lakukan oleh pemerintah desa. 3. Sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian yang dilakukan atas nama selfianus juniario lokasi penelitiannya berada di Desa pusat damai , kecamatan ,kabupaten sanggau provinsi kalimantan barat. Sedangkan penelitian yang dibuat penulis berlokasi di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan , provinsi riau. 2. Tahun penelitian selfinus juniario yaitu pada tahun 2016, sedangkan tahun penelitian dari penulis yaitu tahun 2019. 3. Teori yang digunakan dalam penelitian selfinus juniario yaitu menggunakan konsep implementasi strategi J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:17-18), sedangkan pnelitian penulis menggunakan teori Ndraha (2003:201) dengan menggunakan konsep manajemen aset David J Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam joesron (2005, :18)

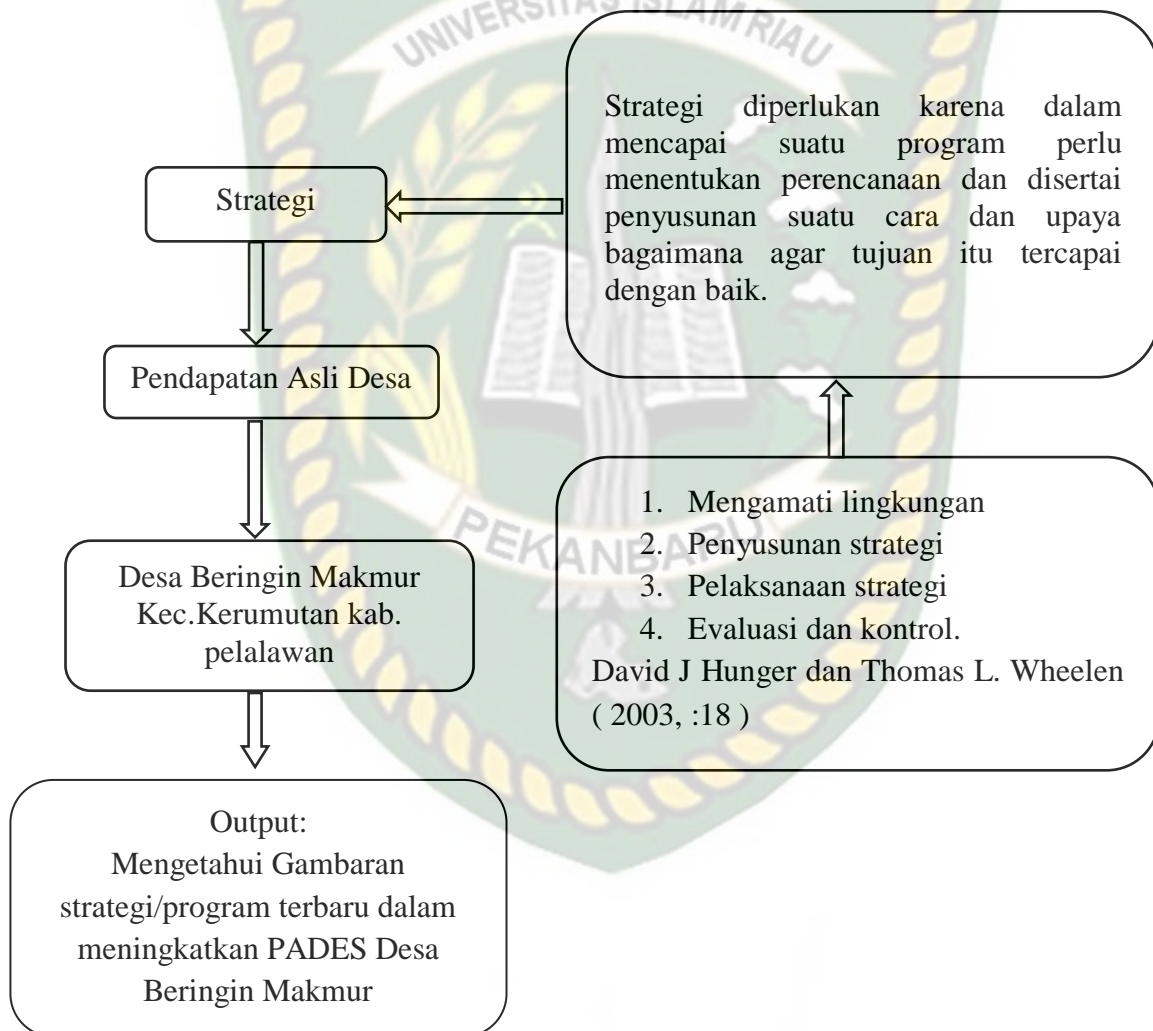
2.	<p>Strategi pengelolaan pendapatan asli desa Dalam meningkatkan pembangunan desa pandanarum Kecamatan pacet kabupaten Mojokerto. Mila fatihatu yusifa (2014)</p>	<p>1. Sama sama meneliti tentang pendapatan asli desa 2. Sama sama menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.</p>	<p>1. Penelitian yang dilakukan mila fatihatu yusifa memang sama sama tentang pendapatan asli desa namun lebih berfokus terhadap pembangunan desa sebagai hasil pengelolaan pendapatan asli desa. 2. Lokasi penelitian berada di desa pandarum kecamatan pacet kabupaten Mojokerto, sedangkan lokasi penelitian yang di buat penulis berada di desa beringin makmur, kecamatan, kerumutan kabupaten pelalawan. 3. Teori yang digunakan dalam penelitian mila fatihatu yusifa menggunakan teori strategi optimalisasi pendapatan asli desa oleh Mardiasmo.(2007;238) 4. Tahun penelitian yaitu tahun 2014 sedangkan penelitian penulis pada tahun 2019.</p>
----	---	--	---

3	Strategi pengelolaan sumber daya desa hanyukupi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Erika akmala hayati dan lena satlita m,si (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama sama meneliti tentang pendapatan asli desa 2. Sama sama menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus dalam penelitian ini yaitu dalam sektor saja sumber daya desa yaitu usaha desa (Bumdes) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa sedangkan penelitian penulis berfokus kepada seluruh sektor dari sumber sumber pendapatan asli desa. 2. Tahun dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2016 sedangkan pnelitian penulis dilakukan pada tahun 2019. 3. Teori yang digunakan dlam penelitian ini yaitu J. David hunger , dan Thomas L. Wellen.
---	--	---	---

C. Kerangka pikir

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.1:kerangka pikir penelitian tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan



Sumber:modifikasi penulis 2019

D. Konsep oprasional

Adapun konsep operasional variabel yang di operasikan di dalam penelitian ini adalah tentang Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa pada desa beringin makmur ,kecamatan kerumutan, kabuppaten pelalawan.

1. Strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan ,kemenangan atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu organisasi maupun dalam lembaga.
2. Pemerintah desa , adalah kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pendapatan asli desa adalah, pendapatan desa yang dihasilkan dari sumber sumber asli desa dan peran peran serta masyarakat.
4. Mengamati lingkungan, adalah kegiatan memonitoring faktor internal dan eksternal melalui konsep kekuatan , kelemahan, kesempatan dan ancaman.
5. Penyusunan strategi adalah membahas mengenai pengembangan rencana jangka panjang seperti penentuan visi dan misi , tujuan yang akan dicapai .mengembangkan strategi yang diwujudkan melalui suatu program .
6. Pelaksanaan strategi, merupakan wujud dari penerapan kebijakan kebijakan yang telah di tentukan melalui pengembangan program, budget dan pelaksanaan strategi pada setiap organisasi dapat berbeda beda tergantung dengan keadaan lingkungan sebuah organisasi.

7. Evaluasi atau kontrol, untuk mengetahui apakah organisasi berjalan sesuai dengan strategi yang disusun maka, organisasi perlu sebuah pengawasan baik dari keanggotaan atau pihak internal maupun pihak ketiga

E. konsep operasional variabel

Tabel II.2 operasional variabel strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan.

Konsep	Variabel	Indikator variabel	Sub indikator
Strategi adalah setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, lembaga atau perusahaan untuk menentukan kinerja jangka panjang. David.J.Hunger,dan ThomasL.Wheelen (2003, :4)	Strategi pemerintah Desa	Mengamati lingkungan	a. Kekuatan b. Kelemhan dan c. Ancaman
		Penyusunan strategi	a. Visi b. Misi
		Pelaksanaan strategi	a. pengembangan program b. budgeting
		Evaluasi/control	a. monitoring internal dan eksternal b. pihak ketiga

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis disini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif . tipe penelitian ini berupaya menggambarkan objek ataupun subjek yang di teliti sesuai dengan apa adanya , serta menjelaskan tentang variabel yang di teliti yakni “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Penelitian”. Menurut Moloeng (2005) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi , tindakan dan lain lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada kantor kepala Desa Beringin Makmur . penulis melakukan penelitian di tempat ini dikarenakan desa ini bisa dikatakan maju namun, dalam sisi pendapatan Asli Desa masih tergolong kecil di karenakan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa, hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta untuk mengetahui seberapa besar dan sejauh mana daya upaya pemerintah desa untuk

mengoptimisasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADES).

C. informan dan key informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi berupa sebuah informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang sebuah penelitian. (Moloeng ,2000;97). Informan merupakan orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti . di dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang yang benar-benar memahami permasalahan yang akan diteliti dalam hal ini yaitu kepala Desa beringin makmur.
2. Informan , yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti , adapun yang dimaksud sebagai informan disini adalah sekdes beringin makmur, kepala BPD, anggota BPD, kepala BUMDES dan jajaran perangkat Desa serta masyarakat.

D. teknik penarikan informan.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penarikan informan, untuk key informan yaitu Kepala desa beringin makmur menggunakan teknik *snowball sampling* begitu juga dengan informan tambahan yakni Sekdes dan jajaran perangkat desa. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan responden sumber data yang pada awalnya jumlahnya tersebut belum memberikan data yang lengkap maka harus mencari orang lain untuk digunakan sebagai sumber data (sugiyono (2012;96).

Sedangkan untuk masyarakat sekitar yang relatif banyak maka penulis menggunakan teknik purposive sampling yakni suatu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang di berikan bisa lebih representatif Sugiyono (2010).

Di dalam penelitian ini penulis menentukan informan yang berdasarkan pertimbangan usia , yaitu pada usia dewasa yakni;

1. Pada usia 26 sampai 35 di kategorikan sebagai usia dewasa awal
2. Pada usia 36 sampai dengan usia 45 di kategorikan sebagai dewasa ahir.

Adapun alasan penulis melihat pertimbangan usia dikarenakan berkaitan dengan pemahaman dan sudut pandang yang dimiliki oleh informan.

E. Jenis dan sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer ,yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang didapatkan atau diperoleh langsung dari hasil observasi , wawancara dan dokumentasi.
2. Data sekunder , adalah data yang diperoleh sebagai informasi pendukung berupa hasil penelitian yang relevan , dokumen dan arsip, laporan, catatan catatan, dari kantor kepala desa beringin makmur.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan cara cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan suatu data dalam penelitian, pengumpulan data dan informasi dalam penelitian dapat menggunakan teknik teknik:

1. Observasi

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk melakukan pengembangan secara langsung terhadap pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan desa dalam sektor pendapatan asli desa.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada responden dan dari para informan terkait.

3. Dokumentasi

Adalah merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengambil data data dari catatan maupun dokumentasi yang diperoleh melalui dokumen dokumen ataupun arsip arsip dari kantor desa beringin makmur.

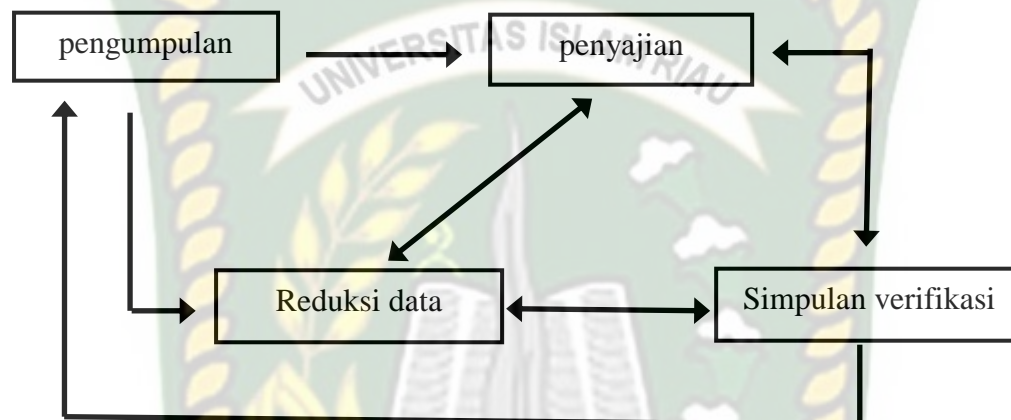
G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada melalui beberapa sumber dan menghubungkan dengan sebuah fenomena fenomena sosial serta menelusuri semua fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yang berdasarkan dari hasil penelitian. Selanjutnya dia analisis secara kualitas dengan uraian serta memberi

penjelasan yang mendukung , setelah itu hasil hasil analisis di tarik sebuah kesimpulan yang merupakan hasil ahir dari penelitian.

Proses sebuah analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan seperti yang tergambar di bawah in;

Gambar II.1 beberapa komponen analisis data model interaktif



(Miles ,and Huberman 1992;20)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mencocokkan sebuah proses analisis data dari beberapa sumber dan dari teknik teknik yang berbeda dari awal pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan ditarik suatu kesimpulan . dengan alur ini data dapat disederhanakan untuk melihat keterkaitan kategori dan sifat sifat data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang jelas dan tepat. Adapun penjelasan menurut miles dan huberman (1992;16-19) yaitu;

Pertama , pada tahap pengumpulan data peneliti melakukan sebuah proses atau kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

Kedua, reduksi data dapat diartikan sebagai kegiatan pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari sebuah analisis dan reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang dapat mengarahkan sekaligus menyederhanakan sebuah data yang terlalu bertele-tele atau data yang tidak perlu digunakan.

Ketiga, penyajian data yang sebagai sekumpulan informasi yang sudah tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, bagi analisis kualitatif penyajian data yang dibahas meliputi beberapa hal yakni matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya digunakan untuk menggabungkan informasi didapatkan dalam suatu bentuk yang utuh. Dengan demikian seorang peneliti dapat melihat apa saja yang terjadi dan dapat menarik sebuah kesimpulan ataupun dapat melanjutkan penganalisa'an.

Keempat, menarik kesimpulan dan verifikasi adalah bagian kegiatan dari bentuk atau wujud yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama sebuah penilaian sedang berlangsung. Sederhananya verifikasi merupakan suatu tinjauan dari beberapa catatan-catatan yang ada di lapangan.

Pada analisis data kualitatif, masalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi menjadi tolak ukur suatu keberhasilan dari kegiatan penelitian dan merupakan sebagian rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul.

H. jadwal penelitian

Tabel III.2 jadwal waktu kegiatan penelitian tentang strategi pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa di Desa Beringin makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Jenis kegiatan	Tahun 2019-2020 /bulan/hari																															
	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei											
Penyusunan UP	X	X	X	X																												
Seminar UP									X																							
Revisi UP									X	X	X	X																				
Revisi kuesioner													X																			
Analisa data													X	X																		
Bimbingan skripsi																	X	X	X	X												
Perbaiki BAB																					X											
Acc. Skripsi																									X							
Ujian skripsi																													X			
Perbaikan																																X
Pengadaan skripsi																																X

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Beringin Makmur

1. Sejarah Desa Beringin Makmur

Dahulu desa ini merupakan bagian dari wilayah desa kerumutan kecamatan kuala kampar kabupaten kampar provinsi riau, yang dimana wilayah ini dahulunya merupakan sebuah perkebunan karet milik masyarakat . di tahun 1989 pemerintah sedang mencanangkan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk yang khususnya penduduk pulau jawa yang menjadi prioritas dan akan ditempatkan di beberapa pulau yang penduduknya bisa dikatakan sedikit dan memiliki wilayah yang luas di seluruh wilayah indonesia yang antara lain yakni pulau sumatra termasuk juga di provinsi Riau.

Dengan adanya program transmigrasi dari pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah provinsi riau pun dapat bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yakni PT. ASTRA AGRO LESTARI yakni perusahaan yang berfokus kepada bidang perkebunan melalui PROGRAM PIRTRANS (perkebunan inti rakyat transmigrasi) yang dimana pada waktu itu PT. ASTRA AGRO LESTARI menunjuk anak perusahaannya yakni PT. SARI LEMBAH SUBUR untuk membuka lahan transmigrasi yang dihitung dalam luas ± 10.000 Ha dan lahan tersebut akan ditanami pohon kelapa sawit (*palm oil*) dan sisanya akan dibagikan kepada masyarakat transmigrasi.

Pada tahun 1989 tepatnya pada tanggal 17 maret di datangkan penduduk transmigrasi yang berasal dari pulau jawa sebanyak 115 kepala keluarga (KK) dan

dari lokal sebanyak 55 kepala keluarga (KK) dan diberi nama oleh dinas transmigrasi yakni UPT.V SP3 dan pada tanggal 20 april 1989 didatangkan lagi penduduk dari pulau jawayang berjumlah 130 kepala keluarga (KK) dan lokal 75 kepala keluarga (KK) , pada tanggal 7 juli 1989 didatangkan lagi dari pulau jawa yang berjumlah 149 kepala keluarga selanjutnya pada tanggal 1 oktober 1989 didatangkan kembali yang berjumlah 56 kepala keluarga (KK) . maka diperoleh penduduk UPT.V SP3 pertamakalinya berjumlah 579 kepala keluarga dan 1.421 jiwa.

Penduduk UPT.V SP3 terdiri dari beberapa suku yakni sebagai berikut:

1. Suku jawa
2. Suku melayu
3. Suku sunda
4. Suku madura

Adapun agama yang di anut oleh penduduk UPT.V SP3 adalah

1. Agama islam 97%
2. Agama kristen/nasrani 2%
3. Agama lainnya 1%

Mata pencarian atau profesi rata rata penduduk UPT.V SP3 adalah sebagai buruh tani dan pedagang kecil yang berpenghasilan pada masa itu sebesar ± Rp 70.000,00

Dan sebagai buruh tani harian berpenghasilan ± Rp 1.250,00. Namun pemerintah juga memberikan beberapa bantuan kepada warga penduduk transmigrasi, adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa:

1. Beras 35 Kg
2. Lauk pauk yang berupa ikan kering atau yang lazim disebut ikan asin 3Kg
3. Minyak goreng 3liter
4. Minyak tanah 10 liter
5. Gula,garam,teh, kopi dan sabun

Pembagian lahan kebun kelapa sawit atau plasma pertama kali dilakukan dan di bagikan kepada masing masing kepala keluarga (KK) dengan pembagian sebanyak 1 kavling atau dalam satuan hektare yakni seluas 2 Ha. Setelah semuanya mendapat pembagiannya maka secara perlahan keadaan ekonomi masyarakat UPT.V SP3 semakin membaik dan semakin meningkat hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penduduk yang mampu men-sekolahkan anaknya kepada jenjang yang lebih tinggi, daya beli masyarakat yang meningkat dapat dilihat dengan banyaknya penduduk yang memiliki kendaraan roda 2 serta peralatan lainnya berupa televisi yang bahkan barang tersebut sudah dianggap mewah pada masa itu. Seiring berjalannya waktu dan hasil sawit yang mulai meningkat maka banyak pula penduduk yang merehab rumah yang ditinggalinya hal ini membuktikan bahwa peningkatan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan pemerintah terkait dengan program transmigrasi.

Pada tanggal 22 desember tahun 1994 kepala UPT.V SP3 yaitu bpk yusmar umar SH membentuk pemerintah transisi desa yang mengingat bahwa pada tahun 1996 yang mengharuskan bahwa seluruh daerah atau wilayah transmigrasi harus dikembalikan keada PEMDA (pemerintah daerah. Dan pada masa itu terpilihah seorang pjs kepala desa yaitu bpk HARUN SURYADI dengan

nama desa yang masih bernama desa “*SIALANG PERMAI*” kecamatan kuala kampar kabupaten kampar provinsi riau. Kemudian setelah 2 tahun berlalu yakni pada tanggal 10 mei 1998 dilakukan lah pemilihan pjs kepala Desa untuk yang ke dua . dan hasil pemilihan oleh beberapa tokoh masyarakat maka terpilihlah Bpk YUSNAJI . dsn seiring berjalannya waktu dan bertepatan pada tanggal 22 Desember 1998 pukul 12:15 WIB di lakukan perubahan atas nama Desa “*SIALANG PERMAI*” menjadi Desa “*BERINGIN MAKMUR*” yang dimana struktur pemerintahan Desa BERINGIN MAKMUR sebagai berikut:

1. Pjs kepala Desa : bpk Yusnaji
2. Sekdes : bpk Hamsu munajat
3. Kaur pemerintahan : bpk Bambang sukoco
4. Kaur keuangan : bpk gampang
5. Kaur pembangunan : bpk Udin uwo
6. Kaur kesra : bpk Zainal fauzi
7. Kaur umum : bpk Mahdi prabowo

Dan dibantu oleh 2 orang kepala Dusun dan 5 ketua RW (rukun warga) , 24 ketua RT (rukun tetangga) ,24 orang hansip dan 11 orang LKMD. Kemudian pada tanggal 14 april tahun 2000 diadakanlah pemilihan kepala desa secara demokratis yang melibatkan masyarakat desa beringin makmur secara keseluruhan dan yang telah memiliki hak pilih. Pada masa itu terdapat 3 calon/kandidat KADES (kepala desa) yaitu bpk Yusnaji, bpk Gampang, bpk Abdul shomad. Dan dilakukanlah sebuah pemilihan dan sesuai dengan pilihan masyarakat desa beringin makmur maka terpilihlah kembali bpk Yusnaji menjadi

kepala Desa beringin makmur untuk yang ke-2 kalinya. Setelah selama 10 tahun bpk yusnaji menjabat terhitung mulai dari semasa menjadi Pjs kepala desa sampai dengan menjabat sebagai kepala desa defintif tentunya beliau banyak kekurangan dan banyak pula kelebihan hal itu sudah wajar tergantung darimana kita menilai seseorang.

Hal yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat selama bpk Yusnaji menjabat sebagai kepala desa defintif adalah dengan adanya atau masuknya listrik yang dikelola oleh pihak PLN , terhitung dari jumlah 10 Desa yang berada di kecamatan kerumutan hanya desa beringin makmur lah yang mendapatkan listrik dari PLN selebihnya desa lain masih mengandalkan dana swadaya untuk kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini menjadi kebanggaan sekaligus menjadi sisi positif bagi pemerintah desa beringin makmur sebagai dasar untuk memotivasi aparatur desa lainnya untuk menjadikan desa yang lebih baik lagi seiring dengan budaya budaya gotong royong masyarakat yang masih terjaga, kehidupan masyarakat yang tentram dan kekuatan ekonomi masyarakat yang semakin laama semakin meningkat.

2. Visi Dan Misi Desa Beringin Makmur

VISI:

Desaku RENDEM BERSAMO dan SEJAHTERA (religius , demokratis dan berdaya saing modern)

MISI:

1. Meningkatkan kualitas taqwa iman dan pendidikan serta kebudayaan melalui pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama, antar umat beragama dan berbudaya
2. Memajukan pemerintahan desa yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia , pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Meningkatkan sarana dan pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian modern
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan persatuan kerukunan antar warga
6. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian rumah tangga miskin.

Hal ini akan tercapai bila pemerintah dan segenap masyarakat dapat bersatu, berkontribusi dan berpartisipasi dan memberikan hal yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa Beringin Makmur.

Seiring dengan berjalannya waktu pada alam semesta begitu pula seiring dengan berputarnya roda pemerintahan Desa Beringin Makmur maka pihak pemerintah desa dituntut untuk dapat membenahi permasalahan-permasalahan yang ada di desa, membenahi dari tingkat kepemimpinan . tingkat Administrasi hingga kepada tingkat pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar supaya Desa Beringin Makmur tidak tertinggal dengan Desa-Desa yang lain maupun desa yang berada di sekitarnya.

3. Keadaan Demografi Desa

Letak Dan Batasan Wilayah

a. BATAS LOKASI

- Sebelah Utara : Kebun Kelapa Sawit PT. SLS II
- Sebelah Selatan : Desa Kerumutan
- Sebelah Barat : Desa Pematang Tinggi
- Sebelah Timur : Desa Kerumutan

b. AKSEBILITAS

Tabel IV.1 akseibilitas Desa Beringin Mkmur

Dari	Ke	Jarak	Sarana Angkutan	Waktu Tempuh	Ongkos (Rp)	Ket
Lokasi	Desa terdekat	1 km	Umum	5 menit	-	-
	Kecamatan	15 km	Umum	20 menit	10.000,00	-
	Kabupaten	90 km	Umum	170 menit	90.000,00	-
	Propinsi	150 km	Umum	240 menit	150.000,00	-
	Kota negara	2.300 km	Umum	2 hari	400.000,00	-

c. Luas areal / wilayah desa

- Tersedia :1.480 hektare
- Pemukiman :350 hektare
- Perkebunan :1.447,5 hektare
- Perkantoran : 2 hektare
- Sekolah :2 hektare
- Tanah kas Desa : 3,5 hektare

d. LEGALITAS

Luas HPL berdasarkan surat	: 1.447,5 Ha (hektare)
Status hutan	: Hutan Milik Negara (TGHK)
Lokasi yang efektif	:289,5 Ha (hektare)
Daya tampung	: 1.000 KK (kepala keluarga)

4. Kependudukan

Jumlah penduduk saat ini berdasarkan:

a. Jenis kelamin

Laki-Laki	: 1.296 jiwa
Perempuan	: 1.231 jiwa
Jumlah	: 2.527 jiwa

b. Jumlah kepala keluarga : 726 KK

c. Suku:

Melayu	Laki-Laki	: 38 jiwa
	Perempuan	: 33 jiwa
	Jumlah	: 71 jiwa
Jawa :	Laki-Laki	: 1.199 jiwa
	Perempuan	: 1.119 jiwa
	Jumlah	: 2.318 jiwa
Sunda :	Laki-Laki	: 17 jiwa
	Perempuan	: 17 jiwa
	Jumlah	: 34 jiwa

Batak: Laki-Laki : 21 jiwa
 Perempuan : 26 jiwa
 Jumlah : **47 jiwa**

Madura : Laki-Laki ; 4 jiwa
 Perempuan : 6 jiwa
 Jumlah : **10 jiwa**

d. Penduduk menurut agama:

Islam; jumlah : 2.223 jiwa

Nasrani protestan jumlah : 95 jiwa

Katolik jumlah : _

Hindu jumlah : _

Budha jumlah : _

Total : 2.314 jiwa

e. Jumlah Penduduk Menurut Usia :

Usia 01 - 05 tahun : 232 jiwa

Usia 06 - 10 tahun : 218 jiwa

Usia 11 - 15 tahun : 227 jiwa

Usia 16 - 20 tahun : 214 jiwa

Usia 21 - 25 tahun : 235 jiwa

Usia 26 - 30 tahun : 251 jiwa

Usia 31 - 35 tahun : 233 jiwa

Usia 36 - 40 tahun : 161 jiwa

Usia 41 - 45 tahun : 219 jiwa

Usia 46 - 50 tahun	: 195 jiwa
Usia 51 - 55 tahun	: 137 jiwa
Usia 56 - 60 tahun	: 88 jiwa
Usia 60 keatas	: 77 jiwa

f. Jumlah penduduk menurut kelompok kerja

10 sampai 14 tahun	: 2 jiwa
15 sampai 19 tahun	: 37 jiwa
20 sampai 26 tahun	: 262 jiwa
27 sampai 40 tahun	: 607 jiwa
41 sampai 56 tahun	: 596 jiwa
57 tahun ke atas	: 129 jiwa

g. Jumlah penduduk menurut mata pencarian

Petani	: 581 jiwa
PNS	: 25 jiwa
Honorer	: 31 jiwa
Pedagang	: 213 jiwa
Buruh	: 31 jiwa
Lain-Lain	: 42 jiwa

5. Bangunan

a. Bangunan keagamaan

Masjid	: 3 buah
Gereja	: 9 buah
Mushola	: 1 buah

b. Kesehatan

Poskesdes : 1 buah

Mantri : 1 buah

Bidan : 4 buah

c. Pendidikan

Taman Kanak Kanak : 2 unit (swasta)

Sekolah Dasar : 2 unit (negeri)

MDA : 2 unit (swasta)

SLTA : tidak ada

SLTP : tidak ada

Perguruan tinggi : tidak ada

d. Olahraga

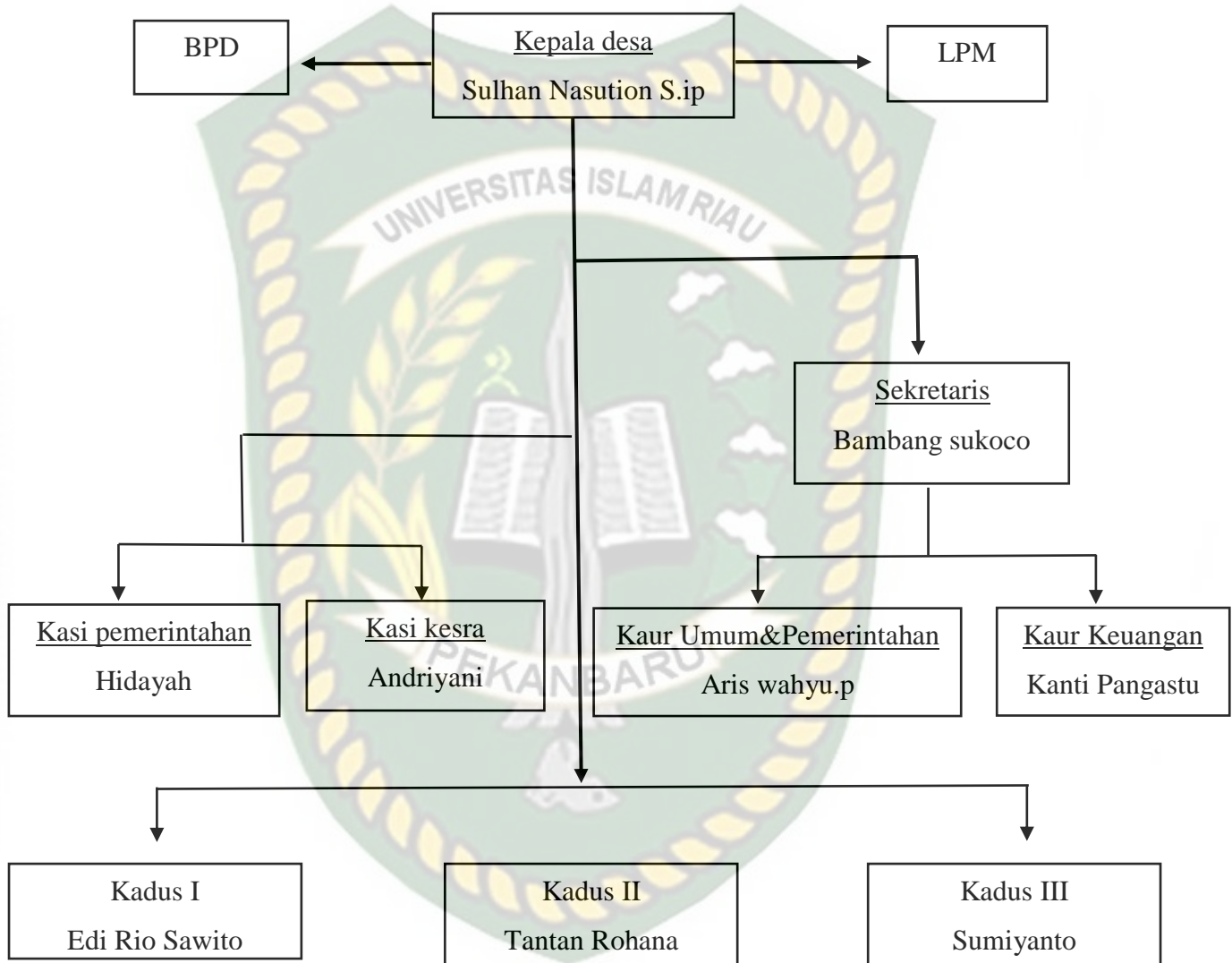
Lapangan sepak bola : 1 buah

Lapangan volly : 5 buah

Lapangan bulu tangkis : 1 buah

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Bagan IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dokumentasi Desa

C. Susunan Anggota BPD Beringin Makmur

Nama Nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua : Junaidi

Wakil Ketua : Triyono

Sekretaris : Indra

Anggota : 1. Supi'i
2. Munjiyanto
3. Sutarno
4. Sri Rahayu

D. Susunan Anggota Organisasi Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM)

Ketua : Subari

Sekretaria : Soni Atmonadi

Bendahara : Sugiyo

Anggota : 1. Sutarji
2. Sukiman
3. Haryono
4. Siti Aminah

Berdasarkan bagan diatas (pada halaman 14) dapat di jelaskan bahwa dalam hal kedudukan,tugas, dan fungsi struktur organisasi pemerintah Desa Beringin Makmur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintah dan penyelenggara dan pelaksana pemerintah desa
- b. Kepala desa bertugas dalam hal proses penyelenggaraan urusan rumah tangganya itu sendiri (yang dimaksud urusan pemerintah desa) maupun dalam hal pembinaan terhadap masyarakat dan meningkatkan semangat masyarakat dalam hal bergotong royong sebagai garda terdepan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan.
- c. Kepala desa berfungsi sebagai koordinator terhadap masyarakat desa dalam proses pembangunan , melaksanakan kegiatan dari pemerintah pusat, dan melaksanakan beberapa kegiatan yang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris Desa

- a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf dalam bidang tata usaha
- b. Sekretaris desa bertugas sebagai menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan dalam hal pembinaan administrasi pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
- c. Sekretaris desa berfungsi sebagai pelaksana dalam hal urusan surat menyurat, arsip desa, berfungsi sebagai administrator keuangan dan berfungsi sebagai pelaksana dari tugas seorang kepala desa jika kepala desa berhalangan dalam urusan atau kepentingan tertentu.

3. Kepala Urusan

- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai petugas pembantu dalam yang sesuai dengan bidang tugasnya masing masing, kepala urusan di bawah langsung oleh sekretaris desa.
- b. Kepala urusan bertugas melakukan kegiatan tata usaha yang sesuai dengan bidang tugasnya masing masing
- c. Kepala urusan berfungsi melakukan pencatatan data, pegumpulan data, hingga pengelolaan data.

4. kepala Dusun

- a. Seorang kepala dusun berkedudukan sebagai suatu unsur pelaksana kerja kepala desa yang sesuai dengan wilayah kerjanya
- b. Bertugas melaksanakan pemerintahan desa di bawah kewenangan seorang kepala desa
- c. Berfungsi sebagai pelaksana kegiatan pemerintah desa, pembangunan masyarakat yang sesuai dengan wilayah kerjanya masing masing , kepala dusun juga melaksanakan keputusan keputusan , kebijakan kebijakan kepala desa yang berbentuk peraturan ataupun kebijaksanaan kepala desa yang tidak tertulis.

E. Aset Desa Yang Menunjang PADes Beringin Makmur

1. Badan usaha milik Desa (BUMDES)

Badan usaha milik desa atau yang disingkat (BUMDES) beringin makmur merupakan usaha yang di dirikan oleh desa beringin makmur yang berlokasi di sebelah utara kantor Desa Beringin Makmur. Badan usaha desa yang diberi nama *BUMDES BINA USAHA* merupakan sektor usaha desa yang bergerak dalam bidang usaha per-fotocopy an , penjualan berbagai alat tulis, simpan pinjam, dan unit usaha gas lpg. *BUMDES BINA USAHA* ,BUMDES BINA USAHA pada mulanya bergerak dalam hal usaha simpan pinjam namun seiring dengan perkembangan waktu BUMDES BINA USAHA mulai berkiprah dalam hal usaha lainnya . badan usaha d

esa ini di dirikan langsung oleh pemerintah desa beringin makmur dengan menggunakan dana desa sebagai modal awal. BUMDES memiliki peran penting dalam menunjang pemasukan desa dalam hal Pendapatan Asli Desa. Adapun jenis usaha yang saat ini di miliki atapun dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDES) terdiri dari :

a. Usaha Unit lpg

Usaha ini merupakan usaha yang dikelola oleh BUMDES yang ber tempat di sebelah kantor desa Beringin Makmur. Usaha unit lpg merupakan jenis usaha yang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa yang dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat.

b. Usaha per fotocopy-an dan alat tulis kantor

Adalah jenis usaha yang dimiliki desa Beringin Makmur yang menjual berbagai keperluan kantor maupun keperluan untuk anak sekolah, usaha ini bertempat di samping kantor Desa Beringin Makmur.

c. Usaha simpan pinjam

Adalah jenis usaha yang di kelola langsung oleh BUMDES Beringin Makmur yang khususnya bergerak dalam bidang perhimpunan serta peminjaman dana kepada masyarakat. Dalam menunjang pemasukan desa (pendapatan asli desa) BUMDES dapat pula menghimpun dana tabungan masyarakat yang dalam skala lokal desa melalui pengelolaan dana secara bergulir dan kegiatan simpan pinjam.

2. Tanah Kas Desa

Tanah kas desa merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Desa Beringin Makmur , Tanah kas desa dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam hal untuk sebuah pembangunan desa, adapun tanah kas desa yang dimiliki oleh Desa Beringin Makmur saat ini seluas 3,5 hektare yang dikelola secara penuh oleh pihak pemerintah Desa yang dalam pengelolaannya difungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit.

3. Pasar Desa

Pasar desa merupakan jenis pasar tradisional yang terletak/berkedudukan di desa , pasar desa dapat dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa.pasar desa memiliki sejumlah peran yang salah satunya yakni sebagai penggerak roda perekonomian di wilayah desa dan sekitarnya baik itu dalam bentuk perdagangan,industri maupun jasa. Dalam menunjang sebuah pendapatan asli

Desa pasar desa bisa menjadi alternatif pemasukan bagi desa melalui retribusi dari penjual yang melakukan aktivitas nya di lingkungan pasar desa. Desa beringin makmur memiliki pasar Desa yang terletak di belakang Kantor Desa beringin makmur seluas 2 hektare. Pasar desa ini berdiri pada tahun 2006 silam, pasar yang beroperasi pada setiap hari rabu ini hingga saat ini masih beroperasi sebagai penyedia kebutuhan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan

Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah disebutkan sebuah identitas informan, identitas informan sangatlah bermanfaat bagi berjalannya sebuah penelitian yakni untuk mengetahui latar belakang informan yang digunakan di dalam sebuah penelitian.

Informan adalah orang yang memberi kontribusi berupa sebuah informasi tentang situasi dan kondisi dari permasalahan permasalahan yang diteliti dan dianggap sebagai orang yang paling memahami sebuah permasalahan yang diteliti.

Untuk mengetahui beberapa identitas informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel V.1: Identitas Informan Penulis Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makamur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sulhan nasution S,ip	Kepala desa	Key-informan
2	Bambang sukoco	Sekdes	Informan
3	Munawir	Ketua BUMDES	Informan
4	Junaidi	Ketua BPD	Informan
5	Edi purwanto	Pengelola pasar	Informan
6	Khasanan	Masyarakat	Informan

Sumber: Data olahan peneliti 2020

Dari tabel di atas maka dapat diketahui beberapa identitas informan, dalam penelitian ini penulis menggunakan 6 (enam) informan yang diantaranya terdiri

dari 1 orang key-informan/informan kunci yaitu menjabat sebagai kepala desa Beringin Makmur.

1. usia informan

Usia merupakan suatu hal yang dapat menentukan sebuah ketepatan maupun kejelasan yang diberikan oleh informan kepada peneliti. Karena pada dasarnya usia menentukan seberapa besar kematangan berfikir dari seseorang. Sehubungan dengan itu semua, maka penulis menggambarkan beberapa kriteria usia informan yang di gunakan dalam penelitian ini.

Tabel V.2: Identitas Informan Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kriteria Usia.

No	Tingkat umur	Jumlah	Presentase (%)
1.	15-25	-	-
2	25-35	-	-
3	35-45	6	100%

Sumber: Data olahan peneliti 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan usia dari informan yang digunakan dalam penelitian ini berusia diatas 30 tahun maka dapat dikatakan kematangan usia sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh penulis.

2. jenis kelamin

Di dalam sebuah karya ilmiah penentuan jenis kelamin dari para informan yang diambil tidak terlalu berpengaruh terhadap ketersediaan informasi hanya saja dalam sebuah kegiatan pengambilan informasi dari jenis kelamin informan (laki laki) lebih mudah untuk memeberikan informasi kepada penulis dikarenakan

informan laki laki biasanya lebih mudah dijumpai di dalam kantor maupun diluar jam kerja kantor sehingga dalam proses pengambilan informasi lebih mudah dilakukan oleh penulis. Namun,terpaut dengan semua itu baik itu informan laki laki maupun perempuan ketersediaan informasi tetaplah sama . jikalau ada informasi yang dibutuhkan maka semua informan baik itu laki laki maupun perempuan akan tetap sama sama memberikan informasi sesuai dengan porsi yang ada.

Beberapa jenis kelamin informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3 Identitas Informan Penelitian Tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki laki	6	100%
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	6	100%

Sumber: Data olahan peneliti 2020

Dari tabel identitas informan berdasarkan jenis kelamin diatas dapat diketahui bersama bahwasanya secara keseluruhan para informan berjenis laki laki yang berjumlah 6 orang dari mulai kepala desa, sekretaris desa, ketua BUMDes, ketua BPD, anggota BPD serta Masyarakat

3. Tingkat pendidikan.

Di dalam kasus penelitian sebuah karya ilmiah sering terdapat beberapa pertanyaan pertanyaan seputar latar belakang pendidikan informan yang digunakan oleh penulis. Pada dasarnya latar belakang ataupun tingkat pendidikan dari seorang informan sangat menentukan terhadap jawaban jawaban yang

diberikan terkait proses wawancara peneliti kepada informan. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat mempengaruhi sebuah pemahaman dari para informan.

Sehubungan dengan itu semua penulis memberikan beberapa daftar tingkatan pendidikan dari para informan yang diambil oleh penulis yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.4 identitas informan tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Buta huruf	-	-
2	Tamatan SD	-	-
3	Tamatan SMP	1	16,6%
4	Tamatan SMA	4	66,4%
5	Tamatan akademi	-	-
6	Tamatan sarjana (s1)	1	16,6%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data olahan peneliti 2020

Seperti yang sudah tertera pada tabel diatas dapat diketahui secara bersama bahwasanya tingkatan pendidikan para informan yang diambil oleh penulis paling banyak terdiri dari tamatan SMA , yang terdiri dari sekdes, ketua BPD, anggota BPD dan ketua BUMDes. Sedangkan tamatan smp terdiri dari satu orang masyarakat dan dalam jenjang tamatan sarjana yakni kepala desa beringin makmur itu sendiri.

B. Strategi pemerintah desa beringin makmur

Sebagaimana yang sudah tertulis pada BAB 2 bahwa desa adalah sebuah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan memiliki batas batas wilayah. Adapun pengertian sebuah desa juga tercantum di dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Desa atau Desa adat atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Selanjutnya, dalam menunjang sebuah kemandirian desa pemerintah desa sangatlah berperan penting dalam menentukan kebijakan kebijakan terkait dengan pendapatan yang diperoleh desa. Desa bisa dikatakan mandiri jika desa dapat meminimalisir bantuan bantuan keuangan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun bantuan dari pemerintah daerah.

Sehubungan dengan itu semua desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalwan seharusnya memiliki sebuah strategi ataupun gagasan dalam menunjang dan meningkatkan sebuah pendapatan asli desa dalam hal ini desa “beringin makmur” baik itu strategi dalam pengelolaan, pengembangan, pengamanan serta pemanfaatan sebuah aset yang dimiliki oleh desa. Sesuai yang tertera dalam PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016 kepala desa lah yang berkewenangan menentukan gagasan gagasan tentang pengelolaan,

pengembangan, pengamanan serta pemanfaatan aset desa dibantu oleh sekretaris desa sebagai pembantu pengelola aset desa dan unsur perangkat desa sebagai petugas atau pengurus aset desa.

1. Mengamati lingkungan

Mengamati lingkungan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menentukan sebuah gagasan atau strategi untuk memonitoring faktor internal dan faktor eksternal dengan memperhatikan konsep kekuatan, kelemahan serta ancaman. Kekuatan dalam hal ini mencakup sebuah kemampuan finansial serta keunggulan spesifik yang dimiliki (Pearce & Robinson 2008, 299). Kelemahan yang dimaksud disini adalah sebuah keterbatasan atau kekurangan dalam menentukan sebuah gagasan sebuah organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan bapak Sulhan Nasution S.Pd pada tanggal 20 April 2020 pukul 10:30 WIB selaku kepala desa Beringin Makmur yang menentukan sejumlah gagasan terhadap program meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh penulis:

“ untuk saat ini strategi yang sudah kami laksanakan itu pengembangan BUMDes ya, seperti penambahan unit usaha percetakan poster dan baliho kemudian kita juga mengenakan tarif pajak kepada masyarakat yang memanfaatkan tanah bengkok yang sekarang digunakan sebagai kebun kelapa sawit, untuk pajaknya sendiri kita tarik dalam setiap bulan dan kita kenakan tarif Rp 1000/ pokok sawit. Untuk penambahan aset lain seperti wisata kolam renang belum bisa kami laksanakan, masih dalam bentuk perencanaan karena terkait keterbatasan biaya”

Kemudian penulis/peneliti juga mewawancarai ketua BPD yakni Bpk Junaidi terkait strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa beringin makmu, beliau juga mengatakan hal yang sama yakni:

“strategi kami yang sudah kami sepakati bersama dengan pemerintah desa itu penarikan pajak tanah bengkok yang di kelola masyarakat yang seluas 17 hektare, pajaknya kami lakukan penarikan per satu bulan, kemudian juga ada penambahan usaha yang dikelola oleh BUMDes usahanya sendiri itu usaha percetakan. Kalau rencana lainnya itu ada juga tapi belum bisa kami tindak lanjuti.

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari 2 orang informan yakni kepala desa Beringin Makmur dan Ketua BPD Beringin makmur yang dimana hasil wawancara terkait strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa beringin makmur dapat dikatakan bahwa strategi yang dilakukan masih sedikit, peneliti mengatakan seperti ini di karenakan bercermin dari wawancara yang dilakukan yang kedua informan tersebut masing masing mengatakan hal yang sama yakni strategi yang sudah dilakukan yaitu penarikan pajak tanah yang dikelola oleh masyarakat, penambahan usaha percetakan. hal itu menurut pandangan penulis masih dirasa kurang signifikan dalam mendongkrak pendapatan asli desa beringin makmur.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bpk Sulhan Nasution selaku kepala desa beringin makmur pada tanggal 20 april 2020 pukul 10:30 WIB tentang kesesuaian strategi terhadap lingkungan sekitar dan berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan:

“ ya saya rasa itu semua sudah sesuai dengan keadaan sekitar, seperti usaha percetakan misalnya, di sekitar wilayah kecamatan kerumutan belum ada yang

menjalankan usaha percetakan kita juga sudah mengkaji secara bersama sama tentang penarikan pajak terhadap masyarakat tentunya jika kita menarik dan menggunakan tanah tersebut secara paksa ya nantinya akan terjadi konflik .maka kita sepakati bersama melalui musyawarah bersama masyarakat juga dan akhirnya kita kenakan pajak penggunaan tanah bengkok tersebut dan saya rasa itu semua sudah sesuai lah dengan kondisi kita. Untuk rencana membuat wisata kolam renang nanti kami lakukan pengkajian bersama, soalnya juga butuh modal yang besar.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bpk Bambang sukoco selaku sekretaris desa beliau mengatakan bahwa:

“kalau pajak pengelolaan tanah dari masyarakat itu sudah tepat, untuk usaha percetakan dalam segi lingkungan memang belum ada bentuk usaha yang serupa, tapi kan jika dilihat dalam segi penghasilan saya rasa itu kurang ya, kan usaha percetakan modalnya besar juga, untuk menutup modal pun untuk saat ini belum bisa tercapai”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yakni Bpk Khasanan di kediamannya pada tanggal 20 mei 2020 pada pukul 20:40 WIB peneliti mewawancarai Bpk Khasanan selaku masyarakat dikarenakan beliau memang benar benar mengerti perihal keadaan desa beringin makmur, dan beliau mengatakan bahwa:

“ bisa dibilang sesuai juga tapi kan seharusnya pemerintah desa juga harus mencari cara lain selain itu, seperti pasar itukan milik desa juga, kalau di kelola dengan baik juga bisa menambah pemasukan desa kita tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Usaha percetakan kan itu modalnya besar .

dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 08 juni 2020 terhadap indikator mengamati lingkungan bahwasanya strategi yang dilakukan oeh pemerintah desa Beringin makmur bahwasanya strategi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah desa belum sesuai dengan kondisi atau keadaan

lingkungan sekitar terkhusus pada strategi dalam penambahan unit usaha printing atau percetakan. Hal ini terlihat dikarenakan usaha percetakan tersebut sangatlah membutuhkan modal peralatan usaha yang besar dan biaya produksi yang bisa dikatakan mahal serta pemeliharaan yang lumayan rumit terlebih lagi untuh baliho juga masyarakat masih jarang yang membutuhkannya terkecuali di waktu waktu tertentu. Kemudian daripada itu pemerintah desa jika ingin meningkatkan sebuah pendapatan asli desa seharusnya juga jangan berfokus kepada penambahan aset usaha ataupun yang lainnya, pemerintah desa juga harus berfokus kepada pengelolaan terhadap aset aset yang sudah ada sehingga tidak terlalu mengeluarkan biaya atau anggaran yang besar dalam fokus mendongkrak sebuah pendapatan asli desa.

Berdasarkan dar hasil penelitian terhadap indikator mengamati lingkungan ditemukan bahwasanya pemerintah desa Beringin Makmur dalam menentukan strategi kurang memperhatikan lingkungan sekitar dalam fokus penambahan usaha unit percetakan . untuk strategi dalam hal penarikan pajak tanah bengkok yang dikelola oleh masyarakat dapat dikatakan sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar. Dikarenakan hal ini merupakan sebuah jalan untuk menghindari konflik dengan masyarakat jika tanah tersebut akan dikelola oleh pihak desa.

2. penyusunan strategi

Pada tahap perumusan strategi adalah tahap dimana terjadinya proses pembahasan dalam rangka pengembangan jangka panjang seperti penentuan visi dan misi ,tujuan yang akan dicapai dan diwujudkan dalam wadah sebuah program visi dan misi adalah sebuah alasan keberadaan sebuah organisasi dan mendorong

berbagai pihak maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Cristoper barth (2000.1) Visi dan misi berperan penting dslam penentuan maupun pencapaian sebuah program, dengan analogi kenapa kita disini? Apa bisnis kita? Dan apa yang akan kita dapatkan ? berdasarkan dimensi penyusunan strategi peneliti melakukan sejumlah wawancara kepada Bpk Sulhan Nasution S.IP selaku kepala desa beringin makmur pada tanggal 20 april 2020 pada pukul 10:30 WIB . peneliti melakukan wawancara yang berkaitan dengan apa visi dan misi Desa Beringin Makmur yang menjadi dasar untuk meningkatkan pendapatan asli desa, dan hasil wawancara beliau adalah:

“kami memiliki visi yakni Desaku RENDEM BERSAMO dan SEJAHTERA yang kami maksud disini itu lingkungan yang religius, demokoratis dan berdaya saing moderen. Kami juga mempunyai misi yang kami prioritaskan seperti meningkatkan sarana dan infrastruktur perekonomian kepada masyarakat yang moderen kemudian juga tentunya memajukan pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pen eliti kepada kepala desa beringin makmur terkait dengan hal visi dan misi yang menjadi dasar program meningkatkan pendapatan asli desa maka, penulis menyimpulkan ada beberapa hal yang di peroleh terkait visi dan misi yang di canangkan oleh pemerintah desa yakni penulis memiliki pandangan yakni visi yang di nyatakan oleh pemerintah desa sudah tergolong bagus dan dapat di kategorikan sebagai sebuah visi yang inovatif. Adapun dalam hal misi yang di gagas pemerintah desa sudah sesuai, peneliti memiliki pandangan bahwa misi tersebut sudah cocok jika di gunakan

sebagai dasar atau motifasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa beringin makmur.

Peneliti juga melakukan wawancara kepana Bpk sulhan nasution selaku kepala desa beringin makmur terkait pengelolaan aset desa berupa pasar desa dan beliau pun mengatakan bahwa:

“ kalau untuk pasar belum ada kita lakukan langkah langkah baru ya, memang selama ini pemasukan kita dari pasar ya masih kita bilang sedikit di pasar kita Cuma mengambil retribusi pedagang saja, itupun seminggu hanya sekali kan,, biasanya per lapak pedagang kita patok Rp 5000. Kalau dari retribusi pasar itu bukan kita yang mengelola. untuk langkah pengelolaan yang baru belum kita fokuskan kesitu karena udah terlanjur carut marut ya dari pemerintahan sebelumnya”

Kemudian untuk memperjelas bagaimana pengelolaan terkait retribusi parkir pasar desa peneliti mewawancarai Bpk Edi purwanto di kediamannya pada hari rabu tgl 24 juni pukul 14:00 yakni beliau selaku pengelola dalam hal parkir pasar desa beringin makmur dan beliau pun mengatakan bahwa:

“ memang waktu dulu sebelum masa pemerintahan kepala desa yang sekarang Bpk sulhan pasar itu kan belum dikelola secara penuh oleh desa, karena banyak masyarakat yang kehilangan motor di area parkir maka saya kelola, saya mengelola itu juga atas izin kades waktu Bpk Misdiyanto yang menjabat, sampai sekarang juga masih saya yang mengelolanya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa sebagai key informan dan Bpk Edi purwanto selaku pengelola retribusi parkir pasar desa beringin makmur, maka peneliti pun dapat menyimpulkan bahwa belum adanya strategi yang dilakukan oleh desa terkait dengan pengelolaan pasar desa beringin makmur. Seharusnya pemerintah desa juga memperhatikan aset desa berupa pasar

karena dalam hal ini pasar juga berkontribusi di dalam pendapatan asli desa beringin makmur, tentunya kurang sinkron jika dalam misi yang tercantum adalah meningkatkan sarana dan infrastruktur moderen bagi masyarakat jika pasar desa masih carut marut dalam hal pengelolaannya.

Dalam waktu yang bersamaan peneliti juga mewawancarai Bpk Sulhan Nasution selaku kepala desa beringin makmur terkait bagaimana mekanisme dari proses penyusunan sebuah gagasan/strategi dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan berikut adalah hasil wawancara dengan beliau:

“Jadi, kita menyusun sebuah strategi itu tentunya kita lakukan dalam forum musyawarah ya, kita kumpulkan aspirasi dari masyarakat kemudian kita bahas dan sepakati secara bersama”

Kemudian peneliti juga mewawancarai ketua BPD yakni Bpk Junaidi di kediamannya pada hari Kamis tgl 14 Mei pukul 13:00 terkait dengan hal yang sama dan beliau mengatakan bahwa:

“Ya tentunya kita kumpulkan juga masukan-masukan dari masyarakat lanjut kita adakan musyawarah bersama dengan kepala desa juga, kita bahas dan akhirnya kita sepakati dalam bentuk peraturan. Memang tidak semua usulan dari masyarakat bisa kita ambil ya, kita ambil masukan-masukan yang sesuai dengan keadaan maupun kemampuan kami”

Untuk memperkuat pernyataan yang diutarakan oleh kedua informan dan key informan di atas, maka peneliti pun juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yang ikut aktif dalam mengusulkan aspirasi dari masyarakat lainnya yakni Bpk Khasanah pada tanggal 20 Mei pada pukul 21:00 WIB dan beliau mengatakan:

“Kalau usulan kami sebagai masyarakat memang ada beberapa yang di penuhi ya contohnya pajak penggunaan tanah bengkok itu, yang semula Rp3000/pohon

sawit menjadi Rp1000. Memang ada juga usulan usulan kami yang tidak di penuhi seperti penambahan usaha percetakan itu tidak ada musyawarah dengan masyarakat. Kemudian juga penduduk pasar yang menggunakan bangunan permanen itu juga sampe sekarang tidak ada respon. Seharusnya pasar itu kan bukan untuk rumah penduduk, kami juga dulu ikut berkontribusi dalam pembangunan pasar itu melalui iuran desa /patungan jadi saya rasa seharusnya perlu diperhatikan juga supaya pasar itu lebih tepat guna lah istilahnya .

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 08 juni 2020 terkait dengan indikator penyusunan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa beringin makmur bisa dikatakan sedikit dan belum merencanakan strategi yang lain terkait dengan aset aset yang dimiliki oleh desa beringin makmur seperti pasar desa,tanah kas desa berupa perkebunan sawit terlebih lagi tanah kas desa berupa perkebunan kelapa sawit disini kurang pula perawatan hal ini tentunya perlu juga di berlakukannya sebuah strategi .untuk saat ini pemerintah desa hanya menyusun strategi dalam penambahan usaha BUMDes dan penarikan pajak terhadap tanah yang desa yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian dalam mekanisme penyusunan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah desa tidak seluruhnya mengedepankan aspirasi dari masyarakat.sehingga dalam sebuah kegiatan menentukan sebuah strategi yang berorientasi terhadap pendapatan asli desa masih terkesan masih belum maksimal. selanjutnya pemerintah harus juga memperhatikan sebuah lingkungan lingkungan yang bersifat strategis untuk sebuah gagasan dalam jangka panjang maupun pendek sehingga dalam rangka meningkatkan sebuah pendapatan asli desa lebih maksimal dengan pengeluaran yang minimalis sehingga tercipta sebuah manajemen desa yang efektif ,efisien,tepat guna dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan indikator penyusunan strategi maka dapat ditemukan bahwasanya : belum ditetapkannya gagasan atau strategi untuk mengelola pasar desa sebagai salah satu aset desa yang dapat menghasilkan sebuah pendapatan bagi desa karena saat ini pasar desa beringin makmur tidaklah dikelola oleh pemerintah desa melainkan dikelola oleh pihak lain ,kemudian belum adanya pula sebuah penyusunan strategi terhadap aset desa berupa tanah kas desa yang berbentuk perkebunan kelapa sawit selanjutnya pemerintah desa disini kurang memperhatikan aset aset tersebut sehingga dalam sebuah strategi hanyalah BUMDes saja yang menjadi prioritas.

3. Pelaksanaan strategi

Dalam tahap ini merupakan tahap dimana wujud dari sebuah penerapan suatu kebijakan-kebijakan yang telah di tentukan sebelumnya melalui pengembangan maupun budget dari sebuah program .hansen&otley (2003;95.116) pelaksanaan sebuah strategi dapat dilakukan tergantung dengan keadaan lingkungan sebuah organisasi maupun sebuah lembaga. Sehubungan dengan itu semua pelaksanaan strategi yang dimaksud disini adalah bagaimana penerapan dari sebuah gagasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa beringin makmur. Untuk mengetahui bagaimana sebuah penerapannya maupun siapa saja yang terlibat dalam tahap ini maka peneliti melaukan sebuah wawancara kepada pihak terkait.

Adapun disini peneliti melakukan wawancara dengan Bpk Sulhan Nasution pada tanggal 20 april 2020 beliau selaku Kepala desa beringin makmur

terkait dengan strategi yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan PADes dan beliau mengatakan bahwa:

“untuk saat ini kita prioritaskan ke pengembangan usaha BUMDES dulu ,kedepan bisa jadi kita fokuskan ke pembangunan fasilitas wisata kolam renang , tentunya kita lakukan secara bertahap juga tidak bisa sekaligus”

Selanjutnya , perihal siapa saja yang terlibat dalam tahap pelaksanaan strategi yang dicetuskan oleh pemerintah desa Bpk Sulhan Nasution mengatakan:

“tentunya dalam hal ini kita melibatkan beberapa tokoh ya, dari BPD juga ada, ketua BUMDes selaku pelaksana pengembangan usahanya dan tentunya kita libatkan masyarakat juga dalam kegiatan penarikan retribusi pajak penggunaan tanah.”

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada ketua BUMDES Beringin makmur yakni Bpk Munawir di kediamannya pada tanggal 15 mei 2020 pukul 20:40 WIB dan berikut adalah hasil wawancara dengan beliau:

“ ya memang dalam pengembangan ataupun penambahan usaha BUMDes saya terlibat disini atas perintah Bpk kepala Desa dan saya sebagai pelaksana saja, tentang apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, kalau untuk modal kita itu dari pemerintah desa”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait dengan penyertaan modal untuk penambahan usaha BUMDES beringin makmur dan berikut adalah hasil wawancara dengan Bpk sulhan Nasution:

“ kalau untuk modal awal kemarin sesuai dengan yang tertera di APBDes , kita anggarkan sekitar Rp 162,000,000,00 untuk usaha percetakan di BUMDes.

Kemudian peneliti juga mewawancarai ketua BUMDes yakni Bpk Munawir terkait dengan hal yang sama dan beliau mengatakan bahwa:

“kalau modal untuk usaha percetakan ini saja kemarin dianggarkan oleh Bpk Kades sekitar Rp 162.000.000,00 itu semua untuk membeli peralatan peralatan

yang dibutuhkan, seperti alat percetakan kita beli second 140.000.000,00 selebihnya kita gunakan untuk beli komputernya sama bahan untuk produksi “

Sehubungan dengan itu semua peneliti melakukan wawancara kepada Bpk Sulhan Nasution berkaitan dengan transparansi anggaran yang digunakan dalam strategi ini kepada masyarakat dan beliau mengutarakan bahwa:

“ya saya rasa kami sudah cukup transparan ya kepada masyarakat, masyarakat juga bisa melihat di baliho yang kami pajang di depan kantor desa, ya kami fikir kalau untuk masyarakat kami tidak perlu menutup nutupi itu nantinya kan ini semua untuk masyarakat juga”

Dari hasil observasi peneliti pada tanggal 8 juni 2020 terkait dengan dimensi pelaksanaan strategi memang usaha percetakan sudah selesai dan sudah siap untuk beroperasi namun, untuk pelanggan masih tergolong sepi untuk saat ini. Selain itu belum ada juga sumber daya manusia /pegawai BUMDes yang mampu dalam mengoperasikan peralatan percetakan maupun dalam hal design grafis sehingga dalam proses pemesanan dari pelanggan cukup memakan waktu yang tidak singkat hal ini tentunya juga menjadi sebuah problem yang harus di pecahkan oleh pemerintah desa maupun dari ketua BUMDes untuk *me Manage* agar pendapatan yang diperoleh dapat pula memenuhi dan mendongkrak pendapatan asli desa beringin makmur.

Berdasarkan Dari hasil penelitian diatas ditemukan bahwasanya terkait indikator pelaksanaan strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa beringin makmur bahwasanya strategi yang sudah digadang oleh pemerintah desa sudah dilaksanakan yakni penarikan pajak dan usaha percetakan namun untuk usaha percetakan yang dikelola BUMDes belum dapat berjalan maksimal terkait dengan pelanggan yang sepi serta kemampuan pegawai yang belum mahir dalam

menggunakan sistem oprasi alat percetakan. Dalam tahap pelaksanaan dalam artian adalah sebuah penerapan sebuah rencana, banyak ataupun sedikit sebuah rencana jika dalam pelaksanaannya tergolong minim maka, sebuah tujuan tidak akan tercapai.

4. **evaluasi dan control**

Evaluasi dan control weleh (2000:5) merupakan sebuah aktivitas dimana di dalam sebuah organisasi, instansi maupun lembaga agar supaya sebuah strategi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan maka perlu adanya sebuah evaluasi /penilain dari sebuah kegiatan strategi yang sudah dilaksanakan dan tentu juga perlu adanya control yang peneliti maksud disini adalah dalam hal pengendalian maupun pengawasan harus berjalan seiringan dengan penerapan sebuah strategi yang telah digadang oleh pihak terkait.

Sehubungan dengan hal evaluasi dan control maka,peneliti melakukan sebuah wawancara kepada kepala desa beringin makmur yakni Bpk Sulhan Nasution pada tanggal 20 april 2020 terkait dengan kapan kegiatan evaluasi dilaksanakann dan berikut adalah hasil wawancara peneliti:

“ untuk evaluasi tentu kami laksanakan setelah pelaksanaan kegiatan, misalnya usaha percetakan ini kan sudah selesai dan kalau sudah ada hasil nanti kita lakukan evaluasi , kalau untuk retribusi pajak itu saya rasa memang sudah sesuai jadi untuk sekarang tidak perlu kita lakukan evaluasi ”

Selanjutnya terkait dengan hal yang sama Bpk Munawir selaku Ketua BUMDes beringin makmur mengatakan bahwa:

“ya tetap kita lakukan evaluasi juga , sembari berjalan usahanya kita lakukan penilaian sudah sesuai apa belum, hasilnya bagaimana, ya kalau semisal tidak tepat ya tentunya kita lakukan langkah langkah lain”

Tidak terbatas pada hal evaluasi saja, peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala desa beringi makmur Bpk Sulhan Nasution terkait dengan kegiatan controlling pihak pemerintah desa terhadap strategi yang sudah dilaksanakan dan berikut adalah hasil wawancara peneliti:

“untuk control itu selalu kita lakukan, seperti usaha di bumdes itu saya sudah mengkoordinasikan dengan ketua bumdes untuk melakukan pengawasan terhadap aset aset usaha yang kita punya, kalau tidak ada pengawasan nanti ya terjadi penyelewengan.

Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan control maka Bpk Sulhan Nasution mengatakan :

“tentunya kita libatkan semua ya, dari kami pemerintah desa juga ikut andil untuk melakukan pengawasan, termasuk juga ketua BUMDes itu sendiri, kita juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan barangkali memang ada penyelewengan masyarakat langsung berkonsultasi dengan kami ya intinya kita libatkan semua.

Selanjutnya untuk mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan controlling maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bpk Sulhan Nasution pada tanggal 20 april 2020 dan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“dalam hal mengajak masyarakat yang pastinya kita lakukan pendekatan personal, saya ambil contoh ketika saya di masjid atau di warung sembari berbincang kita juga bisa mengajak masyarakat itu untuk turut andil dalam pengawasan “

Terkait dengan hal yang sama yakni kikutsertaan masyarakat dalam kegiatan controlling maka peneliti mewawancarai Bpk Khasanan selaku masyarakat pada tanggal 20 mei 2020 dan diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“kalau dalam hal mengajak memang ada dan saya rasa yang dilakukan oleh kepala desa ini baik, jadi kita sebagai masyarakat jika memang tau kalau ada yang tidak beres kan tidak ragu lagi kalau berkonsultasi dengan kepala desa”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bpk Sulhan Nasution berkaitan dengan pendapatan asli desa beringin makmur yang sudah terakumulasi dapatkah memenuhi kebutuhan desa dan peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

“ya memang kalau dalam hal kebutuhan desa seperti pembangunan hasil PADes kita belum bisa memenuhi itu, jadi pendapatan dari PAD hanya kami gunakan untuk kebutuhan peringatan hari hari besar nasional, santunan dan beasiswa untuk siswa sekolah dasar. Untuk pembangunan belum bisa memenuhi”

dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 8 juni 2020 bahwasanya kurangnya control terhadap jam oprasional BUMDes yang sering tidak beroperasi atau tutup serta ber oprasi dengan waktu yang singkat hal ini membuktikan bahwa control yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun pihak pengelola BUMDes belum terlaksana dengan baik , bahkan dalam sebuah kegiatan pelaksanaan unit usaha baru yang dimaksud adalah usaha percetakan (printing) BUMDes BINA USAHA mengalami kerugian dalam hal pembiayaan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel V.5 daftar pembiayaan unit usaha percetakan BUMDes BINA USAHA Desa Beringin Makmur.

No	Jenis Biaya	Nominal	Pembulatan	Presentase
1	BANKEU	Rp 90.329.400,00	Rp 90.330.000,00	56%
2	APBDes	Rp 60.886.000,00	Rp 60.886.000,00	37%
3	Cadangan modal	Rp 9.954.300,00	Rp 9.955.000,00	6%
Total biaya		Rp 161.170.000,00		100%
Biaya unit printing		Rp. 162.000.000,00		-

Sumber:keuangan desa

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa BUMDes BINA USAHA dalam melaksanakan kegiatan penambahan unit usaha percetakan mengalami minus atau kerugian sebesar Rp 830.000,00 dari cadangan modal hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi dari pihak pemerintah desa maupun pengelola BUMDes agar kedepannya tidak terjadi *miss budgeting* .

Selain itu dalam kegiatan *control* tidak terbatas pada pengawasannya saja tetapi harus di iringi dengan sebuah pengendalian.Pengendalian sangat penting untuk memamanajemen sebuah kegiatan dalam sebuah organisasi agar supaya ada langkah langkah berikutnya jika terjadi sesuatu yang tidak mendukung dalam rangka pencapaian sebuah tujuan atau terjadi *miss target*.

Pengendalian di perlukan agar supaya ada langkah langkah lebih lanjut agar sesuai dengan pencapaian tujuan yang dikehendaki, tindakan pengendalian juga membantu untuk menemukan masalah masalah dalam sebuah organisasi sehingga dapat dengan cepat untuk melakukan langkah korektif sehingga penyimpangan sebuah tujuan organisasi dapat diminialisir. Pengendalian juga berguna membantu membawa sebuah kegiitan manajemen kepada siklus perencanaan , yang peneliti maksud disini adalah jika terjadi miss target dari sebuah strategi yang sudah dilaksanakan oleh sebuah organisasi dengan adanya pengendalian maka organisasi tersebut dapat pula merencanakan langkah langkah terbaru agar supaya standarisasi yang diinginkan oleh organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini tidak berlaku pada strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa pada badan usaha milik desa saja, tapi juga berlaku kepada

semua strategi yang digadang dan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa pada aset aset yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian ditemukan bahwa: pemerintah desa kurang melakukan evaluasi terhadap perencanaan usaha baru BUMDes yakni unit printing/percetakan sehingga dalam pelaksanaannya BUMDes masih mengalami kerugian. Selanjutnya kegiatan control yang dilakukan terhadap aset desa termasuk bumdes masihlah berupa wacana serta formalitas saja ini terlihat bahwa masih tidak disiplinnya pegawai BUMDes terhadap jam oprasional yang ditentukan. kemudian,pendapatan asli desa beringin makmur saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan desa berupa pembangunan fisik.

C. Hambatan Hambatan Dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Beringin Makmur.

Dalam mencetuskan sebuah strategi memang bukanlah sesuatu hal yang mudah , perlu mindset yang tinggi serta diperlukannya sebuah latar belakang pengalaman yang panjang. Maka, berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa beringin makmur terkait dengan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatasn asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan dan dapat diperoleh suatu hambatan hambatan sebgai berikut:

1. Kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dan berpengalaman dalam merencanakan strategi sehingga strategi yang sudah di cetuskan masih tergolong dalam lingkup yang kecil
2. Seringnya menentukan strategi yang dihadapkan kepada pertentangan sebagian masyarakat , contoh sperti pasar, desa ingin memaksimalkan

pasar sebagai media perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan pasar untuk sepenuhnya digunakan untuk lapak pedagang namun dilain sisi tidak etis jika desa bermusuhan dengan masyarakat yang mempunyai rumah permanen di lingkungan pasar. sehingga pemerintah desa sulit untuk memaksimalkan sebuah fungsi pasar.

3. Tidak adanya kawasan yang bernilai strategis seperti kawasan wisata alam sehingga harus mencari strategi yang lain. agar PADes dapat meningkat maka, mau tidak mau desa harus memanfaatkan sebuah kreatifitas dari SDM pemerintahn desa serta kemampuan desa di bidang finansial.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di desa beringin makmur kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan peneliti dapat menarik kesimpulan yang dilihat dari:

Pertama dalam mengamatai lingkungan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya pemerintah desa beringin makmur kurang memperhatikan lingkungan sehingga strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa belum sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar terutama pada penerapan strategi terhadap usaha BUMDes sehingga strategi pada usaha BUMDes masih memiliki banyak (ancaman) yang dimaksud adalah sebuah kebangkrutan dikarenakan besarnya biaya yang digunakan dalam usaha ini *kedua* ,dalam sebuah penyusunan strategi dapat disimpulkan bahwa belum adanya penyusunan strategi terkait dengan pasar desa beringin makmur sehingga dalam mewujudkan visi dan misi desa desa yakni mewujudkan *infrastruktur perekonomian masyarakat yang berdaya saing moderen* belum sepenuhnya dapat diwujudkan serta belum adanya penyusunan strategi terhadap tanah kas desa berupa kebun sawit.. *Ketiga* , dalam pelaksanaan strategi dapat disimpulkan yang berdasarkan perolehan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwasanya ada 2 strategi yang diprioritaskan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa yakni retribusi pajak dari masyarakat terkait dengan tanah

bengkok yang dikelola masyarakat, kemudian pelaksanaan strategi terkait penambahan usaha percetakan BUMDes ,namun dalam usaha percetakan BUMDes belum berjalan maksimal dikarenakan pegawai yang belum mahir dalam menggunakan alat percetakan. *Keempat*, evaluasi dan control dapat disimpulkan bahwa dalam tahap ini belum dilakukan evaluasi/control secara maksimal dan hanya sebatas wacana dalam proses evalisai/control terbukti bahwa BUMDes masih mengalami kerugian serta belum adanya tindakan terkait dengan oprasional BUMDes yang sering tutup. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa beringin makmur belum maksimal dalam meningkatkan PADes.

B. Saran

Adapun saran peneliti yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedepannya diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah desa untuk kiranya mengajak orang yang berpengalaman nan berkompeten dalam menentukan sebuah strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dengan memperhatikan seluruh aset yang dimiliki oleh desa beringin makmur dan tidak berfokus kepada usaha BUMDes saja
- b. Sebaiknya pemerintah desa dalam menentukan usaha desa untuk kiranya membuat usaha yang berhubungan dengan kebutuhan dasar pokok masyarakat seperti penyedia barang sembako yang terintegrasi terhadap usaha usaha kecil di masyarakat sekitar.

- c. Dan dengan adanya penelitian ini pemerintah lebih cepat dan sigap dalam menentukan strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa sehingga desa tidak bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Adisamita , Raharjo , 2006 *pembangunan perdesaan* , Yogyakarta graha ilmu
- Anom surya putra , 2015 buku , *7 badan usaha milik Desa : spirit kolektif Desa* , kementerian Desa , pembangunan Daerah tertinggal , dan transmigrasi Republik indonesia
- Awang, Azam dan Wijaja mendra , 2011 *sistem pemerintahan Daerah di indonesia* , alaf Riau , Pekanbaru
- Budiarjo , miriam , 2009 *Dasar Dasar ilmu politik* . PT Gramedia pustaka utama jakarta
- Efendi khasan , 2010. *Penguatan pemerintahan Desa* , indra praharsita , Bandung
- George R Terry, 2014 *prinsip prinsip manajemen* , PT Bumi Aksara ,jakarta
- Hunger, J. David dan thomas L Whelen . 2003 *manajemen strategis* , yogyakarta
- Kartono,kartini 2006, *pemimpin dan kepemimpinan* .PT Raja Grafindo persada,jakarta
- Mardalis , 2010. *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* , bumi aksara : yogyakarta
- Moelong , Lexy , 2005 *metode penelitian kualitatif* , bandung , reemaja rosada karya
- Moenir , H.A.S . 2010 *,manajemen pelayanan umum di indonesia* . bumi aksara . jakarta
- Nawawi, hadari, 2005 , *metode penelitian sosial* . gajah mada . yogyakarta
- Ndraha Talidzu , 1997 *metodologi ilmu pemerintahan*, rineka cipta : jakarta
- Ndraha ,Taliziduhu, 2005 *kybernologi (sebuah scientific enterprise)* . sirao credentia center,Tanggerang , Banten.
- Nurcholis, Hanif, 2011 *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan* , *Desa* jakarta , penerbit erlangga.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri maulidiah 2016 . *badan permusyawratan Desa* , pekanbaru ,Zanafa publishing.

Rauf , Rahyunir, dan Sri maulidiah , 2015 . *pemerintahan Desa* Yogyakarta ,
Zanafa publishing

Sugiyono , 2011 *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* , Alfabeta ;
Bandung

Sutrisno,Edi,2009 *manajemen sumber daya manusia* , kencana , jakarta

Syaukani ,2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*, Nuansa ,Madani
,Jakarta

Terry , George R dan Rue ,lasley W ,2002 *Dasar Dasar Manajemen* , PT Bumi
Aksara .jakartaa

Wasistiono, sadu 2007 *Prospek pengembangan Desa*, fokusmedia, Bandung

Widjaya,H.A.W, 2002 *pemerintah Desa dan Administrasi Desa* , PT.Raja
Grafindo persada .jakarta

Widjaya ,H.A.W 2010 *otonoomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada,jakarta

Widjaya,H.A.W 2003. *Pememrintah Desa* ,PT.Raja Grafindo Persada , jakarta

Wursanto, 2005 .*Dasar Dasar ilmu organisasi* ,andi offset,yogyakarta

Jurnal

Aji Fani Permana, *Vol 1 No 2 ,2018 Pendapatan Asli Desa dalam upaya
meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Desa*

Latifvah Permata Zandri, Nurullatu Dika Novia Putri1, Rizqi Anfanni Fahmi, *No
. 9 seri. 1 Tahun 2018 strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa*

Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti,*vol 2 no 1 Hal 1-5
strategi manajemen aset bumdes dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa (studi pada bumdes di desa sekapuk, kecamatan
ujungpangkah, kabupaten gresik)*

M.irwan Tahir , *volume 19 No. 3 tahun.2017 model efektivitas organisasi
pemerintah Desa*

Dokumentasi

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Desa, tentang Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa,

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau